



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI II DPR RI
DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI, KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILU RI, KETUA DEWAN KEHORMATAN PENGAWAS PEMILU RI.**

Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke-	: 2022-2023 : V : --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat Waktu Rapat	: Senin, 29 Mei 2023 : 19.14 s.d. 23.24 WIB
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Ketua Rapat	: DR. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua Kom II/F-PG)
Acara Rapat	: Pembahasan dan pengesahan tiga rancangan PKPU dan rancangan perbawaslu
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	: 29 dari 48 orang Anggota dengan rincian:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN:

1. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung
(Ketua/F-PG)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. Saan Mustopa, M.Si.
(Wakil Ketua/F-NASDEM)
4. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)
5. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

7 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. H. Heru Sudjatmoko
4. Drs. Cornelis, M.H.
5. Paryono
6. H.M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.
7. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

3 orang Anggota dari 6 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
3. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

4 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
3. Prasetyo Hadi
4. Ir. Irwan Ardi Hasman

4. FRAKSI NASDEM:

1 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

0 orang Anggota dari 3 Anggota:

-

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Mohammad Muraz, M.M.
2. H. Zulkifli Anwar

3. Rezka Oktoberia

4. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
2. KH. Aus Hidayat Nur

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin
3. Khairul Muhtar, SE., M.M.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

-

ANGGOTA YANG IZIN:

1. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
2. Ir. Hugua
3. H. Yadi Srimulyadi
4. Drs. H. Chairul Anwar, Apt
5. Teddy Setiadi, S.I.Kom.

B. LEMBAGA NEGARA:

1. Menteri Dalam Negeri RI (Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs.H. Muhammad Tito Karnavian, B.S.,M.S.,PH.D.);
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (Hasyim Asy'ari, S.H.,M.Si.,Ph.D.) ;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI (Rahmat Bagja);
4. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI (Heiddy Lugito).

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kita mulai ya Pak ya.

Ini Ketua KPU-nya *enggak* mau anggaran atau bagaimana, *enggak* datang. Sudah cukup apa anggarannya?

Bismillahirrahmanirahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat malam,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat Saudara Kepala BNPP beserta seluruh jajaran, kemudian
Yang terhormat Saudara Ketua DKPP beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat Saudara Ketua KPU atau yang mewakili,

Ke mana Ketuanya ini? Oh, di jalan oh.

Yang terhormat Saudara Bawaslu dan Anggota Bawaslu beserta seluruh jajaran dan,
Yang terhormat Saudara, seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Pertama, kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga kita pada malam hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita, khususnya kami di DPR melaksanakan tugas secara konstitusional di bidang anggaran dalam keadaan *sehat wal'afiat*.

Rapat ini sebenarnya rapat yang keempat dalam satu hari ini, dari pagi, jadi ini memudahkan kita untuk bisa menyatakan forum ini sudah memenuhi kourum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenankanlah.

Ini bahaya ini. Ini kalau kongres partai bahaya ini Pak, palu sidang hilang, untung cuma rapat Komisi II.

Oleh karena itu perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.14 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih pada Saudara Menteri Dalam Negeri sekaligus juga adalah Kepala BNPP, terima kasih kepada Ketua DKPP, Ketua Bawaslu dan Ketua KPU atas undangan yang kami sampaikan pada rapat hari ini.

Dan seperti biasanya setiap tahun kita sudah mulai memasuki masa atau jadwal siklus anggaran, sebagaimana seperti biasa Badan Anggaran DPR

RI mengeluarkan surat edaran dan menugaskan kepada seluruh komisi-komisi agar melaksanakan rapat kerja atau RDP dengan mitra kerjanya masing-masing untuk membahas RKA-KL dan RKP-KL Tahun 2024 yang tentu nanti hasilnya akan dikembalikan, disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI.

Oleh karena itu kami akan, saya akan menawarkan sekaligus meminta persetujuan bahwa rapat kita hari ini rapat agendanya tunggal, untuk membicarakan pendahuluan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2024 dan rencana kerja pemerintah tahun 2024 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan 2023.

Apakah kita bisa setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Nah, seperti juga yang kita sudah bahas tadi pagi, seharusnya rapat ini hanya mengagendakan dengan Kementerian Dalam Negeri dan BNPP dan DKPP, karena tadi kita rapat siang sampai menjelang magrib bersama KPU, Bawaslu dan DKPP maka kita gabungkan. Jadi, kita akan bahas sekaligus rencana, pembahasan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024 dan rencana kerja pemerintah, masing-masing dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari BNPP, DKPP, KPU dan Bawaslu.

Saya minta, dan seperti tadi pagi saya kira kita akan banyak mendengarkan saja ya, penyampaian dari pengajuan atau penjelasan dari rancangan kerja dari masing-masing lembaga.

Nanti pendalamannya akan kita lakukan pada pertemuan yang berikutnya. Biasanya ada pembahasan pendalaman berkaitan soal anggaran yang disampaikan.

Jadi, sebetulnya kita tidak perlu, tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh, karena itu saya, saya tawarkan paling lama pukul 21.00 ya setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Nah, oleh karena itu tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kami persilakan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan penjelasan pendahuluan ya, pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang berkaitan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2024 dan sekaligus evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan 2023.

Kami persilakan.

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL POLISI
(PURN) PROF. DRs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, B.S., M.S., PH.D):**

*Bismillahirrahmanirahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*
Selamat malam,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Name budaye,
Salam kebajikan,

Yang kami hormati Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI,
Kemudian Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP,
Ketua KPU atau yang mewakili beserta jajaran,
Ketua Bawaslu yang hadir beserta jajaran,
Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,
Hadirin sekalian yang berbahagia,

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir pada acara Rapat Kerja sekaligus Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan jajaran Kemendagri, Badan Nasional Pengelolah Perbatasan (BNPP) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam rangka membicarakan pendahuluan pembahasan RAPB 2024 dan RKP tahun 2024 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 lingkup Kemendagri dan BNPP.

Berkenaan dengan surat Wakil Ketua DPR RI tanggal 24 Mei 2023, hal undangan rapat dengar pendapat, maka izinkan kami menyampaikan dengan sistematis.

Yang pertama adalah mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran Kemendagri tahun 2022. Yang kedua adalah pagu realisasi dan capaian kegiatan prioritas Kemendagri tahun 2023. Yang ketiga Rencana Kerja atau RKP Pemerintah. Dan rencana kerja Kemendagri berdasarkan pagu indikatif tahun 2024. Kemudian sekaligus sebagai Ketua BNPP, Kepala BNPP, kami akan menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran BNPP tahun 2022. Dan yang terakhir adalah pagu realisasi kegiatan prioritas BNPP tahun 2023 serta rencana kerja BNPP tahun 2024.

Izinkan kami yang pertama, menyampaikan tentang evaluasi pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran Kemendagri tahun 2022. Ada sejumlah prestasi dan penghargaan sebagai indikator atas capaian kinerja Kemendagri tahun 2022.

Yang pertama adalah mendapatkan peringkat pertama atau kesatu yang terbaik dari 20 K/L atas nilai kinerja anggaran kategori pagu sedang, berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan. Perolehan peringkat pertama merupakan prestasi Kemendagri yang berhasil diraih dan dipertahankan selama tiga tahun berturut-turut, 2020, 2021 dan 2022.

Kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI atas bimbingan dan pengawasan yang diberikan kepada

Kemendagri atas prestasi ini. Kemendagri juga meraih peringkat ketiga kategori penilaian kompetensi kementerian tipe besar dan peringkat keempat kategori penerapan, pemanfaatan data sistem informasi dan Siate atau *computerize assessment test* kementerian tipe besar oleh Badan Kepegawaian Negara, BKN award.

Yang ketiga, penghargaan yang diberikan Ombudsman RI yang menetapkan Kemendagri RI sebagai *top ten* predikat kepatuhan standar layanan publik tahun 2022. Dengan nilai 88,91 atau zona hijau kualitas tertinggi.

Kemudian keempat anugrah keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat dengan capaian wilayah 98,33.

Selanjutnya tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SPIP Kemendagri pada level tiga atau kategori terdefinisi atas penilaian BPKP. Anugrah KPAI tahun 2022 kategori Kementerian Lembaga yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis sistem informasi monitoring, evaluasi pelaporan, ini dari Komisi Perlindungan Anak dan Ibu.

Juga penghargaan dari Jasa Raharja kategori dukungan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui optimalisasi penerimaan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB.

Peringkat pertama kategori Satker pagu jumbo atas penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran dari KPP Jakarta IV Kementerian Keuangan untuk Dirjen Polpum, Pak Bachtiar ini.

Kemudian Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah memperoleh penghargaan Digital P Bank BRI Peringkat kesatu terbaik dan kartu *credit* pemerintah peringkat ketiga terbaik Kementerian Keuangan Indonesia.

Peringkat pertama dengan kategori "pagu besar" satker penerima penghargaan atas pengerjaan laporan keuangan tahun 2022 terbaik dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Umum Negara Sumedang untuk IPDN.

Juga di BKSDN atau Badan Kebijakan Dalam Negeri, penghargaan kartu *credit* pemerintah peringkat kelima terbaik Kementerian Keuangan. Peringkat pertama kategori "sapphire pagu sedang, pagu besar" atas penilaian indikator kinerja pelaksana anggaran KPPN Jakarta IV Kementerian Keuangan.

Kemudian peringkat kedua kategori satker pagu jumbo atas untuk Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Otda tetapi Pak Akmal sedang menjadi Pj. Institute Kementerian Dalam Negeri memperoleh penghargaan dari KemenPAN RB sebagai unit penyelenggaraan republik kategori "sangat baik" lingkup Kementerian dan lembaga Tahun 2022.

Demikian sejumlah evaluasi sebagai indikator tentang kinerja Kemendagri tahun 2022.

Kemudian untuk pagu dan realisasi anggaran Kemendagri 2022 berdasarkan surat Menteri Keuangan tanggal 4 Oktober 2021 pagu alokasi anggaran K/L tahun 2022 Kemendagri adalah sebesar tiga triliun, tiga puluh empat miliar lebih.

Kemudian terdapat perubahan penambahan pagu sebesar 213 juta lebih sebagaimana dengan dalam *slide* dan pengurangan pagu sebesar Rp18.754.000.000,00 sehingga total pagu tahun 2022 Rp3.229.423.335.000,00 atau 3,2 triliun. Adapun rincian kegiatan untuk penambahan dan pengurangan pagu Kemendagri, disajikan lengkap dalam materi yang, narasi yang kami sampaikan kepada Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI.

Rincian dari pagu tiga koma dua puluh dua sembilan triliun adalah sebagai berikut. Alokasi kewenangan Kantor Pusat sebesar 2,7 triliun lebih atau 86,2%. Kantor daerah Rp387 miliar atau 11,9%. Dana dekonsentrasi sebesar Rp55 miliar atau 1,71% dan tugas perbantuan sebesar Rp3 miliar lebih atau 0,1%.

Jenis belanja, belanja pegawai sebesar 25,5% atau Rp826 miliar. Belanja barang 68,6% atau Rp2,2 triliun dan belanja modal sebanyak 5,7% Rp186 miliar. Jadi paling banyak adalah belanja barang.

Untuk berdasarkan sumber dana rupiah murni sebesar Rp2,9 triliun atau 90,7%. Pinjaman luar negeri Rp211,7 miliar atau 6,56%, PNBPN sebesar Rp54 miliar atau 1,7% khususnya pada pengembangan badan SDM Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan Institute Pemerintah Dalam Negeri. Hibah luar negeri sebesar Rp24 miliar atau 0,7% pada Dirjen Bina Bangsa dan Dirjen Bina Keuangan Daerah. Hibah langsung dalam negeri sebesar Rp3,2 miliar atau 0,1% Dukcapil. Kemudian hibah langsung luar negeri Rp5,5 miliar pada Dirjen Bina Bangsa.

Kemudian realisasi anggaran Kemendagri tahun 2022. Dari total tadi sebesar Rp3,2 triliun realisasi anggaran Kemendagri sebesar Rp3,2 triliun, Rp.3.200.796.124.000,00 atau 99,11%. Realisasi anggaran 99,11% tersebut di atas rata-rata nasional 95,6% atau peringkat kedua dari 20 K/L kategori pagu sedang. Rincian saya kira ada di dalam *slide* rinciannya untuk masing-masing unit kerja baik dari Irjen, Irjen Polpum, Irjen yang tertinggi 99,98%, Polpum 99,93%, dan seterusnya. Sementara yang terendah adalah di Dirjen Bina Pemdes tetap 96,96% jadi di atas nasional 95,60%, semuanya di atas nasional. Capaian kegiatan prioritas Kesekjenan meraih "Opini Wajar Tanpa Pengecualian" dari BPK RI delapan kali berturut-turut dan peringkat pertama nilai kinerja anggaran K/L pagu sedang dari Kementerian Keuangan tiga kali berturut-turut.

Kemudian untuk reformasi birokrasi Kemendagri indeksnya sebesar 79,17 atau kategori sangat baik dan BB serta nilai sakit sebesar 74,90 an juga

kategori “sangat baik atau BB” dari KemenPAN RB. Asistensi dan supervisi penerapan hasil informasi daerah SIPD dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Untuk Inspektorat Jenderal diantaranya pengelolaan *monitoring center* bersama dengan untuk pencegahan korupsi bersama KPK dan BPKP. Pembangunan sistem pengawasan keuangan desa atau SISWAKUDES yang telah diterapkan di 161 pemda serta *Trainer Training of Trainer* sebanyak 2.044 aktif di daerah.

Dirjen Polpum tersalurkannya bantuan keuangan partai politik sebanyak Rp126 miliar lebih kepada 96, saya ulangi kepada 9 partai politik yang mendapatkan kursi DPR. Kemudian penetapan 14 calon Anggota KPU dan 10 calon Anggota Bawaslu berdasarkan keputusan tim seleksi untuk masa jabatan 2022-2027. Pendidikan politik melibatkan 1.100 orang dari unsur masyarakat, partai politik, pelajar perempuan, guru, mahasiswa untuk meningkatkan literasi secara politik serta meningkatkan partisipasi pemilu, pilkada serentak 2024.

Dirjen Pemdes diantaranya terselenggaranya pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 yang kondisi keamanan Covid sebanyak 9.204 desa. Kemudian terselesaikannya batas wilayah desa sesuai ketentuan pada 522 desa.

Dirjen Bina Akwil antara lain; penyelesaian segmen batas darat 944, saya ulangi 948 segmen. Diterapkannya PTSP Prima berbasis elektronik di 74 daerah, dalam rangka pengelolaan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu provinsi, kabupaten/kota. Penyelesaian batas negara melalui penyelenggaraan persidangan ketujuh *review board the closing agreement* kembali dengan Malaysia, kemudian persidangan Sosek Malindo, kemudian juga persidangan G-36 *joint border* dengan PNG dan survey garis batas segmen pilar barat Pulau Sebatik Kalimantan Utara. Penguatan tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk 514 termasuk juga 514 kabupaten/kota.

Kemudian Dirjen Bina Keuangan Daerah diantaranya adalah tersusunnya pedoman penyusunan APBD 2023, kemudian asistensi dan supervisi penyusunan program kegiatan pemenuhan *mandatory spending* 400 daerah, asistensi evaluasi *monitoring* pertanggungjawaban keuangan daerah 34 provinsi.

Dirjen Bina Bangda antara lain penanganan *stunting* daerah, kemudian tersusunnya pedoman penyusunan RKPD 2023. Terselenggaranya koordinasi teknis perencanaan pembangunan pusat daerah. Kemudian khususnya 34 provinsi, asistensi dan supervisi daerah dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang direncanakan target 0% untuk tahun 2024. Kemudian untuk badan strategi kebijakan dalam negeri antara lain; tersusunnya indeks inovasi daerah tahun 2022, terlaksananya *innovative government award* penghargaan untuk daerah yang terbaik melaksanakan inovasi.

Kemudian untuk Dirjen Otonomi Daerah diantaranya adalah memfasilitasi pembentukan empat daerah otonomi baru Papua dengan

terbitnya undang-undang tentang empat daerah otonomi baru tersebut yang bersama-sama dengan DPR RI khususnya Komisi II. Kemudian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebanyak 45 kabupaten/kota. Fasilitasi dan asistensi penyusunan dalam Perda, rencana Perda dan Perkada 34 provinsi, ini juga termasuk 1.513 orang Perda dan 1.228 Perkada. Dukungan persiapan pilkada serentak tahun 2024 melalui fasilitasi pengisian pejabat kepala daerah yang akhir masa jabatan tahun 2022 sebanyak 101 daerah yaitu 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Untuk Dukcapil diantaranya perekaman KTP elektronik sejumlah 199.781.570 jiwa atau mencapai 99,37%.

Kemudian kepemilikan akte kelahiran sejumlah 78 juta lebih atau 97,86%, penyerahan data agregat kependudukan, kecamatan untuk sejumlah 275 juta jiwa lebih. Data kependudukan penduduk potensial pemilih pemilu DP4 dengan jumlah 204.656.053 jiwa sudah diserahkan kepada KPU RI. Tanda tangan MoU pemanfaatan data Dukcapil untuk 62 lembaga.

Kemudian untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia diantaranya adalah pengembangan kompetensi bagi Anggota DPRD sebanyak 45.590 dan terselenggaranya pengembangan kompetensi bagi 83.188 ASN termasuk pelatihan-pelatihan fungsional, pelatihan kepemimpinan dan lain-lain.

Untuk IPDN terselenggaranya pengukuhan praja pratama IPDN tahun 2022 sejumlah 1.227 orang. Kemudian terselenggaranya sertifikasi kompetensi bagi 1.993 praja utama angkatan 29. Terselenggaranya *stadium general* bagi praja dan civitas akademika yang terlibat, untuk para praja IPDN yang melibatkan sejumlah tokoh diantaranya Menkopolhukham, Jaksa Agung, dari POLRI, BNPT dan lain-lain.

Misalnya izinkan kami menyampaikan tentang pagu realisasi dan capaian kegiatan prioritas Kemendagri tahun 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023.

Pagu berdasarkan surat Menteri Keuangan adalah untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp2.981.302.990.000,00. Sampai dengan 26 Mei 2023 terdapat penambahan pagu Kemendagri sebesar Rp161.000.000,00 saya ulangi Rp161.412.000.000,00. Sehingga total pagu Kemendagri 2023 menjadi Rp3.142.715.000.000,00 lebih diantaranya dari pinjaman luar negeri untuk Dirjen Bangda sebanyak Rp7.000.000.000.000,00 hibah langsung dalam negeri untuk Dukcapil sebanyak Rp3,6 miliar dan Rp941.000.000,00. Pinjaman luar negeri untuk Dirjen Bina Administrasi Wilayah sebesar Rp7,5 miliar. Penambahan Satker tugas perbatasan sebesar Rp5,5 miliar dan rupiah murni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini ada tambahan yang sudah kita perjuangkan. Terima kasih banyak kepada Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II yang telah mendukung penuh, sehingga ada tambahan untuk DKPP sebanyak Rp66.253.000.000,00 lebih tanggal 8 Mei.

Kemudian untuk rincian pagu Kemendagri sebesar Rp3,1 triliun untuk tahun sampai dengan 26 Mei 2023. Untuk kantor pusat adalah sebesar Rp2,6

triliun, kantor daerah sebanyak Rp353 miliar. Dekonsentrasi Rp72 miliar dan tugas perbantuan Rp5,5 miliar. Belanja pegawainya sebesar Rp860 miliar atau 27%. Belanja barang sebanyak 69% atau Rp2,1 triliun dan belanja modal sebanyak Rp98 miliar atau 3,1%. Rincian pagu berdasarkan unit kerja eselon kami sajikan lengkap dalam materi yang telah kami sampaikan kepada Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI.

Selanjutnya dalam pagu Kemendagri per 26 Mei 2023 sebesar Rp3,1 triliun tersebut didalamnya termasuk Rp157 miliar lebih merupakan *automatic adjustment* atau 5,02% dari total pagu Kemendagri sesuai dengan surat Menteri Keuangan.

Perkembangan realisasi, realisasi hingga tanggal 26 Mei adalah 39,45% ini di atas nasional karena rata-rata nasional adalah 30,46% atau per-tanggal 26 Mei Kemendagri menempati posisi kedua realisasi belanja dari 21 K/L pagu sedang dan peringkat kelima dari total 84 kementerian lembaga. Ini sumber dari OMSPAN Kementerian Keuangan.

Kemudian untuk rincian, saya kira sebagaimana yang ada di sini di dalam *slide* yang tertinggi adalah Polpum 72% lebih, karena sebagian besar sudah diserahkan kepada partai politik, kemudian juga Irjen 41%, kemudian keuangan daerah 40%, DKSDS 40%, Pemdes 39%, BPSDM 38%, Setjen 37%, Dukcapil 37%, Otonomi Daerah 36%, Dirjen Bina Bangda 32% yang kemudian di bawah nasional Alabinakwil, ini ada Pak Syafrizal di sini 29,9% Akwil, dan DKPP 17% dari total Rp92 miliar lebih atau realisasi sebanyak Rp15,8 miliar. Ini beliau sudah bisa untuk melaksanakan sidang di daerah-daerah, tidak lagi *zoom meeting*.

Kemudian untuk capaian kegiatan prioritas Kemendagri per 26 Mei beberapa indikatornya antara lain: terfasilitasinya layanan administrasi sebanyak 6.778 dokumen. Konsultasi 11.185 orang pada pemerintah daerah. Penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang diterima melalui aplikasi Spanlapor 67% dari 544 pengaduan dan atensi supervisi penetapan sistem SIPD dari 38, sudah 38 provinsi, ditambah empat di Papua dan 514 Kabupaten/kota.

Untuk Inspektorat Jenderal pengelolaan *monitoring center for prevention* bersama KPK dan BPKP untuk 8 area intervensi. Menilai evaluasi satu tahun masa jabatan, 44 pejabat kepala daerah, 4 PJ, 35 PJ Pati, 6 PJ Walikota dan dari 105 pejabat yang dilantik sepanjang tahun 2022.

Dirjen Polpum antara lain: telah tersalurkan bantuan keuangan partai politik sebanyak lebih Rp126 miliar lebih, peningkatan kapasitas pengurus ormas melalui kegiatan kursus singkat yang melibatkan Lemhanas dengan topik ideologi Pancasila sebanyak 375 peserta, peningkatan kapasitas aparatur negara di pusat dan daerah untuk kewaspadaan nasional 600 orang. Kemudian terjadinya sinergitas penanganan konflik sosial yaitu pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial di 34 provinsi dan 489 kabupaten/kota.

Dirjen Akwil indikator yang dicapai diantaranya adalah terselenggaranya *Asean Smart City Network*, kemudian memfasilitasi kesepakatan 14 provinsi

dalam penyelesaian batas kewenangan khususnya sumber daya alam di laut. Kemudian pemadam kebakaran, peringatan Hut Damkar dilaksanakan juga perlombaan *national fighter skill competition*.

Kemudian untuk Dirjen Bina Pemdes terselenggaranya Pilkades serentak 2023 di 102 desa, Banten, Jawa Barat, Bali, Gorontalo, Sulsel, aman dan berjalan lancar tanpa sengketa. Penyelesaian penegasan batas wilayah desa 100 desa. Kemudian pelatihan 1.440 aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa untuk peningkatan kompetensi tentang pemerintahan. Kemudian percepatan penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan desa untuk 120 desa dan juga penerapan aplikasi pengelolaan keuangan desa untuk 60 desa.

IPDN diantaranya terselenggaranya *stadium general* bagi praja dan *civitas akademika* dengan melibatkan sejumlah pejabat negara, diantaranya; KPU, kemudian Bawaslu, DKPP dan lain-lain.

Dirjen Bina Bangda terselenggaranya rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan pusat dan daerah 38 provinsi. Kemudian terlaksananya rapat koordinasi tingkat peningkatan integrasi program kegiatan peduli *stunting*. Rapat pengendalian inflasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional setiap minggu, ini kami memang diberi tugas oleh Pak Presiden untuk pengendalian *stunting* dan pengendalian *stunting*, pengendalian inflasi daerah. *Alhamdulillah* turun dari 5,9 di bulan September tahun lalu sekarang di angka 4,3%.

Kemudian Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Pemilihan Produk Hukum terhadap Perda dan Perkada total 17.222 diantaranya adalah 1.730 Perda dan Perkada. Kemudian koordinasi penyelesaian pengalihan aset pada daerah otonomi hasil pemekaran tahun 1999-2014 di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Penataan daerah utamanya untuk menindaklanjuti pemekaran 4 Provinsi DOB di Papua agar operasional.

Kemudian Dukcapil perekaman KTP elektronik 199 juta jiwa lebih, 97,52%, juga akte kelahiran, akte kematian, akte perceraian, kartu identitas anak, ini semua datanya kami sudah sampaikan dalam materi yang kami sampaikan. Juga perjanjian kerjasama pemuatan, pemuatan data kependudukan dengan total sebanyak 6.000 hingga saat ini 6.085 lembaga, baik pemerintah maupun *non* pemerintah.

Dan Dirjen Bina Keuangan Daerah terselenggaranya APBD *reward* dan Rakornas keuangan daerah tanggal 16 Maret seluruh provinsi kabupaten/kota. Asisten supervisi 38 Provinsi, 514 kabupaten/kota untuk peningkatan kualitas keuangan daerah sesuai aturan undang-undang.

Badan strategi kebijakan dalam negeri, penguatan kelembagaan pemerintah daerah di 10 daerah. Pembinaan inovasi daerah dan persiapan

awal penilaian inovasi daerah untuk pemberian penghargaan *innovative government award 2023*.

BPSDM terselenggaranya pengembangan kompetensi anggota DPRD sebanyak 125 orang dan sebanyak 10.728 orang pada 22 universitas, instansi dan 4 instansi dan 9 partai politik.

Kemudian untuk rencana kerja pemerintah atau rencana kerja Kemendagri, berdasarkan pagu indikatif tahun 2024. Sesuai dengan tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan, maka arah kebijakan RKP 2024 pemerintah, pengurangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan, percepatan pembangunan IKN dan pelaksanaan pemilu 2024 serta pilkada 2024.

Sasaran pembangunan dan prioritas nasional RKP: yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi 5,3 sampai 5,7%. Penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan tingkat pengangguran terbuka, *ratio gini* yang membaik, *indeks* pembangunan manusia yang meningkat serta kemiskinan menurun diangka 6 sampai 7,5%.

Ada tujuh prioritas nasional dalam RKP tahun 2024. Kami langsung saja arah kebijakan Kemendagri berdasarkan rencana kerja pemerintah tersebut. Yang pertama, adalah meningkatkan stabilitas politik, hukum, ketertiban dan pengawasan pemerintah daerah. Kedua, memfasilitasi pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Yang ketiga, percepatan pertumbuhan ekonomi, inflasi, penguatan investasi dan kemudahan izin berusaha. Penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kemudian fasilitasi mempercepat penurunan *stunting*. Penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pengembangan sistem informasi pemerintah daerah SPD, penguatan transformasi digital dan layanan administrasi kependudukan. Dukungan fasilitasi percepatan pembangunan Ibukota Nusantara atau IKN. Memfasilitasi percepatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan infrastruktur dasar di empat daerah otonomi baru DOB Papua. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri, reformasi birokrasi dan strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pemerintahan dalam negeri dan sarana prasarana Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian untuk pagu indikatif dan rencana kerja tahun 2024 berdasarkan arah kebijakan tersebut maka pagu indikatif total tahun 2024 adalah sebesar Rp3.209.000.000.000,00 lebih. Ini mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak Rp228.000.000.000,00 atau lebih kurang 7,6%.

Kemudian untuk terdapat juga penurunan alokasi anggaran pada program pembinaan politik dan pemerintahan umum sebesar Rp45 miliar dan

program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa sebesar Rp55 miliar dibanding dengan pagu alokasi anggaran 2023.

Komposisi dari pagu indikatif tersebut: belanja operasional sebesar Rp1,5 triliun atau 48,40%; belanja pegawai Rp927 miliar; belanja barang operasional pemeliharaan perkantoran sebesar Rp626 miliar; belanja non operasional sebesar Rp1,6 triliun atau 51,58%.

Sumber pendanaan rupiah murni adalah Rp3,1 triliun atau 96,8%, pinjaman luar negeri 1,61% atau Rp51 miliar dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp48 miliar atau 1,51%.

Kemudian telah dilaksanakan trilateral *meeting* berdasarkan pagu indikatif tersebut bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BPN dan Bappenas dan disepakati total pagu indikatif Kemendagri per-program.

Untuk program pembinaan politik pemerintahan umum dari pagu alokasi anggaran 2023 adalah Rp197 miliar, jadi indikatif, indikatifnya Rp155 miliar.

Kemudian program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa sebanyak Rp357 miliar alokasi anggaran 2023, indikatif adalah Rp329 miliar, ini berkurang baik, Polpum berkurang Rp41 miliar, Desa Rp27 miliar.

Program tata kelola kependudukan dari tahun alokasi anggaran 2023 sebanyak Rp523 miliar, indikatif 2024 adalah Rp723 miliar. Jadi, bertambah menjadi Rp200 miliar.

Program dukungan manajemen untuk alokasi anggaran 2023 adalah Rp1,9 triliun untuk pagu indikatif tahun 2024 adalah Rp2 triliun lebih. Jadi terdapat selisih atau bertambah menjadi Rp97 miliar.

Untuk rincian, mungkin tolong ditampilkan *slide*-nya, rincian kami tidak bacakan, tetapi intinya adalah dari pagu alokasi anggaran 2023 Rp2,9 triliun lebih, Rp2,981 triliun. Untuk pagu indikatif berdasarkan trilateral *meeting* adalah Rp3,2 triliun, sehingga ada penambahan sebanyak Rp228 miliar. Ini yang kami mohon untuk kiranya berkenan Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II yang kami muliakan dapat mendukung dalam rangka untuk mencapai kerja yang lebih baik, lebih optimal.

Kemudian target dan kinerja kegiatan prioritas Kemendagri tahun 2024 berdasarkan pagu indikatif tersebut, secara rinci saya kira sudah ada dalam narasi. Kesekjenan dan DKPP diantaranya pengembangan STPD, kemudian peningkatan indeks reformasi birokrasi, pelayanan penanganan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di DKPP.

Kemudian di Inspektorat Jenderal Pengelolaan bersama *monitoring center for prevention* 38 daerah, penanganan korupsi. Kemudian juga evaluasi jabatan gubernur penjabat, saya ulangi akhir masa jabatan gubernur 38

daerah, pengendalian inflasi 38 daerah dan evaluasi PJ kepala daerah serta bentuk pengawasan lainnya.

Kemudian untuk Dirjen Polpum, peningkatan kapasitas pengurus Ormas Siborang, bantuan keuangan partai politik, 9 partai politik. Kemudian penguatan demokrasi bagi masyarakat dalam pemilu dan pilkada untuk partisipasi peningkatan partisipasi pemilih, target enam daerah sekaligus literasi demokrasi.

Dirjen Akwil target 22 rekomendasi kebijakan untuk masalah gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik, kemudian juga standar penanganan minimal di bidang bencana, kebakaran meliputi 540 daerah. Fasilitasi dukungan Timus Pemilu dan Pilkada 38 daerah ini juga Dirjen Akwil kemudian pemerintahan desa, masalah tertib administrasi pengelolaan aset desa 150 desa. Kemudian pelatihan aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga masyarakat desa 1.000 orang. PKK dan Posyandu dengan target pemberdayaan 4.500 orang.

Kemudian Dirjen Bina Bangda SIPD, pengembangan SIPD kemudian juga penanganan *stunting* untuk 514 daerah, dukungan perencanaan daerah, masa transisi bagi pilkada serentak 38 provinsi. Dirjen Otonomi Daerah diantaranya adalah rekomendasi tentang DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah). Kemudian juga memfasilitasi persiapan pilkada 2024 termasuk sarana prasarana di daerah. Kemudian untuk Dirjen Bina Keuangan Daerah pengesahan APBD Provinsi tepat waktu. Kemudian menerapkan sistem informasi keuangan daerah SIPD target 540 daerah dan juga memenuhi pendanaan pilkada serentak karena pilkada serentak juga akan dibiayai dari APBD, target 542 daerah.

Kemudian untuk Dukcapil pelayanan koneksi *Warehouse* berbasis NIK nasional, penyediaan jasa jaringan komunikasi dasar target 548 daerah, pengadaan blanko KTP elektronik 22 juta keping. Badan pengembangan SDM, pelaksanaan latihan dasar CPNS tamatan IPDN, kemudian peningkatan kompetensi bagi aparatur pemda perbatasan antar negara khususnya Diklat Camat. Kemudian peningkatan kompetensi pengawas fungsional penyelenggara urusan pemerintahan daerah.

Kemudian Institute Pemerintahan Dalam Negeri diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan bahan makan praja 4.292 praja. Seleksi penerimaan calon praja target 534 orang dan juga melaksanakan *survey* untuk indeks kepuasan *stakeholder* terhadap kinerja alumni.

Inilah kira-kira rencana kegiatan prioritas Kemendagri tahun 2024 dan kami juga sangat terbuka kalau ada masukan-masukan nanti pada saat rapat lanjutan.

Dan kami mohon izin Pimpinan sebagai Kepala BNPP, kami juga ingin menyampaikan tentang evaluasi pelaksanaan anggaran BNPP tahun 2022. Pagu tahun 2022 adalah sebesar Rp247.680.000.000,00 semuanya dari rupiah murni. Pagu alokasi tahun 2022 diblokir atau *set blocked* sebanyak Rp14 miliar

lebih dan telah dibuka blokir sebanyak Rp3,7 miliar. Sehingga pagu alokasi anggaran BNPP menjadi Rp236 miliar lebih, jadi dari Rp247 menjadi Rp236 miliar lebih sebagaimana *slide*.

Realisasi dari Rp236 miliar lebih tersebut per 31 Desember pra pre realisasi sebanyak Rp230.912.000.000,00 atau 97,90% ini juga di atas rata-rata nasional. Komposisinya untuk dukungan manajemen 97,68% pengelolaan batas wilayah negara di kawasan perbatasan sebanyak 98,82%. Jadi, belanja pegawainya sebanyak Rp35 miliar lebih, realisasi 97,09% dan belanja barang Rp174 miliar lebih teralisasi 98,11%. Capaian kinerja realisasi anggaran sebesar 97,90%, inilah peringkat kedua puluh dari 49 K/L pagu kecil atau peringkat 30 untuk total 85 K/L. Sedangkan wilayah indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA-nya 94,2 dan evaluasi kinerja dari KemenPAN RB nilai 95,54 atau kategori "sangat baik".

Ini capaian kinerja program BNPP tahun 2022 Sekretariat BNPP alokasi anggaran sebanyak Rp191 miliar, realisasi 97,68% diantaranya adalah pengelolaan sistem pemerintah yang berbasis elektronik dengan nilai 2,71 atau kategori "baik" dari KemenPAN RB. Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penghargaan JDIH terbaik dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian tercapainya hasil survey penilaian integritas dengan nilai 79,45 di atas rata-rata nasional 71,94 dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Terlaksananya dukungan operasional pengelolaan zona inti dan zona pendukung ada 84 lintas batas, pos lintas batas nasional.

Kemudian terlaksananya indeks pengelolaan kawasan perbatasan, kemudian terselenggaranya pembangunan perbatasan atau gerbang lalu lintas di Talaut Provinsi Sulawesi Utara. Terselenggaranya sosialisasi peraturan Presiden tentang rencana itu pengelolaan batas wilayah negara, kunjungan kerja di pulau terluar, sekaligus juga mendukung pengamanan yang ada di Pulau Rondo oleh satuan TNI Kota Sabang di Provinsi Aceh. Juga terlaksananya kegiatan kerjasama atau rapat forum perguruan tinggi perbatasan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis *agro eco* wisata di Kabupaten Sambas.

Kemudian untuk ke deputian bidang pengelolaan batas wilayah negara alokasi anggaran sebesar Rp16 miliar lebih, realisasi 97,87% atau Rp15,6 miliar, diantaranya terlaksananya fasilitasi pelaksanaan peningkatan satuan sarana prasarana Hankam di pulau-pulau kecil terluar. *Survey* identifikasi pilar titik referensi batas negara, kalibrasi atau verifikasi pilar titik referensi yang tidak berpenduduk di pulau-pulau terluar. Terlaksananya titik titik patok batas negara sepanjang 50 km di Kalimantan Barat. Kemudian monev atau monitor evaluasi sarana prasarana Hankam bersama dengan TNI di Kalbar, NTT dan Papua. Penyelesaian masalah batas wilayah negara darat khususnya antara RI dan Malaysia.

Kemudian fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dan Nunukan Kalimantan Timur. Juga terkoordinasinya pembangunan lima PLBN baru Pos Lintas Batas yang baru yaitu di Bopendigul Papua, kemudian di Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan

Kalimantan Utara di PLTN di Salasan, Pulau Salasan di Kabupaten Natuna Kepri, PLTN Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT dan PLTN Jakoibambang di Kabupaten Ukayang Provinsi Kalimantan Barat.

Kemudian untuk kebutuhan bidang potensi kawasan perbatasan pada anggarannya adalah Rp16,5 miliar terealisasi Rp16 miliar, kurang sedikit atau 99,51% di atas nasional.

Untuk kedeputan bidang infrastruktur kawasan perbatasan alokasi anggaran Rp12,8 miliar terealisasi sebanyak Rp12,7 miliar atau 99,12% dengan sejumlah capaian sebagaimana yang ada ditampilkan dalam layar, sekaligus juga ada di dalam materi yang kami sampaikan.

Kami langsung untuk mempersingkat, mohon izin untuk pagu realisasi dan kegiatan prioritas BNPP tahun 2023. Pagu anggaran 2023 sebesar Rp248.508.000.000,00 lebih, belanja pegawainya adalah 14,28% Rp35 miliar, belanja barang, baik operasional maupun *non* operasional 73,50% atau Rp182 miliar dan belanja modal Rp30 miliar lebih atau Rp12,2 miliar.

Kemudian untuk program dukungan manajemen sebesar Rp205 miliar atau 82% baik untuk layanan legislasi dan litigasi, pengelolaan organisasi SDM kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Perencanaan pengelolaan keuangan barang milik negara, mohon data komunikasi informasi publik, ini tiga, empat hal yang dicapai dengan program dukungan manajemen.

Untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebesar Rp42 miliar diantaranya adalah untuk pengelolaan batas wilayah lintas negara Rp15 miliar lebih, potensi dan penataan ruang kawasan perbatasan sebesar Rp15 miliar lebih juga dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan Rp12 miliar lebih. Kemudian berdasarkan surat kementerian keuangan mengenai *automatic adjustment* BNPP sebesar Rp18 miliar lebih.

Kemudian untuk tahun 2023 beberapa program prioritas nasional BNPP dengan total pagu anggaran sebesar Rp4,2 miliar diantaranya mengenai fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara. Target 180 orang, penyusunan perencanaan pelaksanaan peningkatan sarana prasarana di 49 pulau-pulau kecil terluar. Kemudian fasilitasi pelaksanaan koordinasi mega *project* pusat kegiatan trans nasional (PKSN) perbatasan negara. Ada satu kegiatan, kemudian pelatihan penanggulangan *stunting* dan gerakkan masyarakat sehat kawasan perbatasan.

Realisasi anggaran BNPP sampai dengan 26 Mei 2023 sebesar 35,85%, jadi di atas rata-rata nasional 30% yaitu Rp89 miliar lebih. Dukungan manajemen 35,62% dan pengelolaan batas wilayah negara kawasan perbatasan sebanyak 36,97%. Kalau per-jenis belanja, belanja pegawainya Rp16 miliar lebih atau 45,31% dari Rp35 miliar. Belanja barang Rp182 miliar, realisasi Rp63 miliar lebih atau 34,53% dan belanja modal Rp30 miliar lebih terealisasi Rp9,9 miliar atau 32,7%.

Kemudian rencana kerja BNPP tahun, berdasarkan pagu indikatif tahun 2024. Arah kebijakan diantaranya mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan keamanan penegakkan hukum, kesadaran politik atas kedaulatan negara, mewujudkan peningkatan layanan lintas batas negara, kerjasama lintas negara, mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi pembangunan sarana prasarana dan kualitas sumber daya manusia di perbatasan. Pengelolaan perbatasan negara secara integratif dan tematik.

Kemudian untuk pagu indikatif tahun 2024 adalah sebesar Rp231.300.000.000,00 yang semuanya berasal dari rupiah murni. Total pagu indikatif 2024 ini mengalami penurunan dibanding 2023 sebanyak Rp17 miliar lebih atau lebih kurang menurun 6,92%.

Untuk komposisi pagu indikatif BNPP diantaranya adalah belanja pegawai 16% atau Rp37 miliar, kemudian belanja barang 83,9% atau Rp194 miliar dari total Rp231 miliar. Kemudian belanja operasionalnya adalah Rp180 miliar 77% non operasional 22% atau Rp50 miliar.

Sebagai tindak lanjut bersama, surat bersama pagu indikatif ini telah dilaksanakan *trilateral meeting* bersama dengan Kementerian PPN Bappenas Kementerian Keuangan. Sehingga ada beberapa perubahan dalam pagu indikatif ini, yaitu pergeseran anggaran dari program dukungan manajemen ke program pengelolaan batas wilayah negara. Jadi, program pengelolaan batas wilayah negara ditambah, sementara yang program dukungan manajemen dikurangi sebesar Rp22 miliar lebih. Sehingga per program dukungan manajemen menjadi Rp196 miliar lebih dan pengelolaan batas wilayah negara sebesar Rp34 miliar ada penambahan.

Selain itu BNPP akan mengajukan usulan tambahan anggaran pada program pengelolaan batas wilayah negara untuk melaksanakan kegiatan prioritas Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Target kinerja BNPP per program kira-kira, ini sebagaimana dalam *slide* kami persingkat nilai dari reformasi birokrasi, target A, kemudian akumulasi kinerja target A, kemudian efektif dan organisasi, target minimal peringkat empat, SPBE Sistem Berbasis, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, ini kategorinya "sangat baik" target kita dan sejumlah target lainnya sebagaimana dalam *slide*.

Kemudian hal-hal lain secara rinci tentang target program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, ada sejumlah diantaranya pemberdayaan masyarakat desa terdepan di Merauke, kemudian di pulau-pulau terluar peningkatan sarana prasarana Hankam, mengidentifikasi patok batas wilayah negara di Provinsi NTT dan seterusnya.

Kami mohon maaf tidak bacakan secara rinci namun sudah kami sampaikan dalam naskah kami yang lebih lengkap serta juga terdapat di dalam *slide* sampai dengan huruf R penyusunan rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2025-2029. Namun intinya untuk BNPP ini, ini terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Yaitu dari Rp248 miliar turun sebanyak Rp17 miliar menjadi Rp231 miliar. Ini kami

mengharapkan dukungan, seandainya masih ada ruang untuk bisa dipenuhi tambahan untuk program-program yang merupakan prioritas yang sangat diperlukan dalam rangka untuk menjaga batas negara, sekaligus mengembangkan daerah perbatasan sebagai *buffer zone* di Indonesia sekaligus untuk pemerataan pembangunan Indonesia.

Demikian beberapa hal yang kami dapat sampaikan baik mengenai Kemendagri maupun BNPP evaluasi di tahun 2022 capaian dan realisasi sampai dengan 26 Maret 2023, serta rencana kerja berdasarkan pagu indikatif di 2024. .

Semogga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, pertolongan, petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam rangka mengabdikan kepada masyarakat dan bangsa dan negara tercinta.

Mohon maaf kalau terlalu panjang, sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi,

Terima kasih Saudara Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya kami persilakan kepada DKPP.

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HEIDY LUGITO):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat malam,
Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri,
Yang terhormat Ketua KPU dan jajaran,
Ketua Bawaslu beserta jajaran,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan karunia-Nya kita bisa melakukan rapat kali ini.

Selanjutnya saya akan menyampaikan evaluasi pelaksanaan program anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2022. Pagu anggaran DKPP tahun 2022 sebanyak Rp27,1 miliar dengan realisasi Rp26,9 miliar, sekitar 99% realisasi. Capaian kinerja DKPP tahun 2022.

Satu, telah diterbitkan kode etik penyelenggara pemilu sebanyak 124 pengaduan yang dilakukan mulai dari tahap verifikasi, tahap verifikasi administrasi, verifikasi material, kemudian persidangan.

Perkara yang ditangani tahun 2022 sebanyak 50 perkara. Kemudian capaian indeks kepuasan penanganan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan nilai 80 point 85 dengan target awalnya adalah 80. Sepanjang tahun 2022 DKPP sudah melakukan publikasi yang tujuannya untuk melakukan sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu sebanyak 61.374 kali publikasi.

Kemudian perkembangan pelaksanaan program dan anggaran DKPP tahun 2023. Total pagu alokasi anggaran DKPP 2023 sebanyak Rp26,1 miliar. Selanjutnya terdapat penambahan anggaran yang bersumber dari PABUN sebanyak Rp66,2 miliar.

Terima kasih atas dukungan Pimpinan Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri. Dengan penambahan anggaran Rp66 miliar ini, DKPP bisa melakukan persidangan di daerah-daerah, karena sebagaimana amanat Undang-Undang 7 Tahun 2017 bahwa perkara yang pengaduan kode etik, penyelenggaraan kode etik yang di tingkat kabupaten/kota kita harus bersidang di Ibukota Provinsi.

Selama ini selama pandemi kita hanya bersidang secara *online* jadi kalau hari ini saya datang sendirian dan beberapa kali RDP datang sendirian karena semua Anggota DKPP yang jumlahnya empat orang sedang bersidang di daerah. Jadi, mohon maaf mereka tidak bisa hadir karena sudah terjadwal beberapa hari sebelumnya.

Dengan demikian total pagu alokasi DKPP untuk tahun 2023 sebanyak Rp92 miliar dengan demikian belanja operasional Rp17 miliar sekitar 80% dari belanja pegawai yang Rp7,5 miliar juga belanja barang Rp9,5 miliar, kemudian belanja non operasional sebanyak Rp75,3 miliar dan seterusnya.

Sedangkan target dan kinerja prioritas DKPP tahun 2023, rencana target prioritas. Satu peningkatan pencegahan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, ini akan kita lakukan dengan lebih banyak sosialisasi ke daerah-daerah tentang ketaatan, kepatuhan terhadap etik penyelenggara pemilu.

Selain itu DKPP juga berencana menerbitkan dan menyusun indeks kepatuhan etik penyelenggara pemilu, sehingga setiap daerah akan diketahui, daerah mana yang tingkat pelanggaran etik penyelenggara pemilu makin besar. Dengan demikian kita DKPP bisa melakukan sosialisasi di daerah tersebut lebih intensif. Harapannya ke depan tingkat ketaatan terhadap etik penyelenggara pemilu semakin taat sehingga DKPP juga ke depan mungkin tidak akan diperlukan lagi, karena semua penyelenggara pemilu sudah mentaati etik.

Kemudian saya sampaikan realisasi anggaran DKPP tahun 2023 dari pagu anggaran Rp92,3 miliar realisasi anggaran DKPP per tanggal 25 Mei 2023 sebanyak Rp15,9 miliar atau sekitar 75% dari total anggaran, sangat kecil karena tambahan anggaran yang Rp66 tadi baru pada bulan Mei.

Kemudian saya sampaikan realisasi anggaran menurut jenis belanja:

- A. Belanja pegawai dari pagu anggaran sebesar Rp7,5 miliar realisasi Rp2,6 miliar atau sekitar 37%.
- B. Belanja operasional dan pemeliharaan kantor dari pagu Rp2,2 miliar terealisasi Rp307.466.000,00 atau sekitar 15%.
- C. Belanja non operasional dari pagu sebesar Rp2,006 miliar terealisasi Rp307 miliar atau sekitar 15%.
- D. Belanja modal dari total pagu 0% terealisasi 0%.

Kemudian rencana kerja DKPP untuk tahun 2024, sesuai dengan nota dinas Sekretariat Jenderal No.900.1.2/2025/SC tanggal 8 Mei 2023 hal pagu indikatif Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di tahun 2024 untuk pagu indikatif DKPP tahun 2024 sebesar Rp67,3 miliar. Kalau kita bandingkan dengan tambahan anggaran tahun ini tentu saja turun, dengan rincian:

- A. Belanja opsional sebesar Rp17 miliar atau 25% terdiri dari belanja pegawai Rp7 miliar, belanja barang sebesar Rp9,4 miliar.
- B. Belanja *non* operasional sebesar Rp50 miliar atau 74,74%.

Rencana, target dan kinerja prioritas DKPP Tahun 2024:

1. Penyusunan peraturan atau revisi peraturan perundang-undangan di lingkup DKPP dengan target lima peraturan DKPP. Kemudian layanan penilaian indeks kepatuhan etik penyelenggara pemilu dengan target 825 lembaga penyelenggara maksudnya di tingkat kabupaten kota sampai di tingkat kalau perlu di tingkat kecamatan. Pelayanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik target satu layanan, layanan dukungan manajemen internal dengan target 7 layanan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Layanan sarana dan prasarana internal dengan target satu layanan.
 - b. Layanan hubungan masyarakat dengan target satu layanan.
 - c. Layanan protokoler dengan target satu layanan.
 - d. Layanan umum dengan target satu layanan.
 - e. Layanan bantuan hukum dengan target satu layanan.
 - f. Layanan perkantoran dengan target satu layanan.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat hari ini, kiranya uraian tersebut dapat memberikan gambaran singkat dan evaluasi pelaksanaan program anggaran tahun 2022 dan perkembangan pelaksanaan program anggaran tahun 2023 serta rencana kerja DKPP tahun 2024.

Rencana ke depan yang ingin saya sampaikan adalah selama ini DKPP mendapat bantuan tenaga; tim pemeriksa daerah dari unsur tokoh masyarakat di setiap provinsi ada dua TPD, dua orang TPD itu kita ambil dari kampus. Sifatnya *Ad hoc* dan selama ini anggota TPD itu tidak dibayar, sama sekali tidak mendapatkan honor, mereka akan diberi honor ketika ikut menyidangkan perkara. Di rapat yang terhormat ini saya ingin menyampaikan DKPP berencana memberikan honor bagi Tim Pemeriksa Daerah yang ada di provinsi-provinsi, setiap provinsi ada dua anggota TPD yang kita angkat untuk jangka waktu satu tahun setelah itu diperpanjang untuk sekali lagi, jadi paling

lama dua tahun. Selama ini mereka bekerja dengan suka hati tanpa mendapatkan imbalan apapun kecuali kalau persidangan.

Rencana ke depan tahun depan, mengingat pemilu kita makin dekat dan pekerjaan penegakkan kode etik penyelenggara pemilu makin genjar, kami mengusulkan honorarium bagi Anggota TPD (Tim Pemeriksa Daerah) meskipun bersifat *Ad Hoc*, paling tidak disaat berlangsungnya tahapan-tahapan pemilu dan pelaksanaan pemilu.

Demikian yang kami sampaikan, mohon dukungan Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Komisi II DPR RI dan seluruh Anggota DPR, Komisi II DPR RI. Akhirul salam.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullah,

Terima kasih saudara Ketua DKPP RI.

Selanjutnya kami persilakan Ketua KPU.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang kami hormati Pimpinan Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati para Anggota Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati pemerintah dalam hal ini diwakili Bapak Mendagri,
Yang kami hormati Ketua DKPP,
Yang kami hormati Ketua Bawaslu beserta para anggota,

Izinkan kami menyampaikan presentasi tentang rancangan jadwal pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2024 dan rencana kerja pemerintah tahun 2024.

Yang pertama, gambaran umum anggaran pemilu tahun 2024. anggaran pemilu tahun 2024 yang diusulkan KPU untuk tiga tahun yaitu; sebanyak Rp76.656.312.294.000,00 dan hingga saat ini telah teralokasi sebanyak Rp46.895.292.886.000,00 atau sekitar 61,18% dari pagu usulan awal. Dalam rincian bila dibuat matriks antara tahun 2022, 2023 dan 2024 anggaran.

Yang pertama tahun 2022, usulan KPU adalah Rp8.061.085.734.000,00 yang dialokasikan dalam DIPA dalam rupiah adalah Rp3.516.283.014.000,00 atau sekitar 43,62%. Berdasarkan usulan maka terdapat kekurangan sekitar Rp4.544.802.720.000,00 atau sekitar 56,38 miliar, *sorry*, persen.

Tahun 2023 usulan KPU adalah Rp23.857.317.226.000,00 mendapatkan alokasi dalam DIPA dalam rupiah adalah Rp15.987.872.001.000,00 sekitar 67,01% masih terdapat kekurangan sekitar Rp7.869.446.225.000,00 atau sekitar 32,99%.

Yang ketiga, untuk tahun 2024 usulan KPU adalah Rp44.737.909.334.000,00 yang sudah dialokasikan dalam DIPA adalah Rp27.391.137.871.000,00 atau sekitar 61,23%, masih terdapat kekurangan sekitar Rp17.346.771.463.000,00 atau sekitar 38,77%.

Jadi dari total anggaran tiga tahun yang diusulkan KPU Rp76.656.312.224.000,00 yang sudah dialokasikan DIPA sekitar Rp46.895.292.886.000,00 atau sekitar 61,18% dan masih terdapat kekurangan Rp29.761.019.408.000,00 atau sekitar 38,82%.

Untuk tahun 2022 alokasi anggaran KPU, kita langsung saja ya. Untuk tahun 2024 selain pagu indikatif tersebut KPU mendapatkan alokasi anggaran untuk kebutuhan pilkada gubernur di 4 daerah otonomi baru yaitu; di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Barat Daya sebanyak Rp974.358.715.000,00 ini di luar usulan anggaran pemilu tahun 2024.

Selanjutnya realisasi anggaran KPU pada tahun 2022. Realisasi anggaran KPU tahun 2022. Ada dua program besar: Yang pertama adalah program dukungan manajemen, pagu anggaran Rp1.975.160.579.000,00 realisasinya Rp1.952.270.772.611,00 atau sekitar 98,84% dengan rincian:

- b. Belanja operasional pegawai Rp1.400.429.958.000,00 realisasinya Rp1.389.337.671.837,00 atau sekitar 99,21%.
- c. Belanja operasional kantor Rp435.453.333.000,00 realisasinya Rp427.382.019.779,00 atau 98,15%.
- d. Belanja non operasional Rp139.277.000.288,00 realisasinya Rp135.551.080.595,00 atau sekitar 97,32%.

Program yang kedua adalah program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi totalnya adalah untuk pagu Rp1.541.122.435.000,00 realisasinya adalah Rp1.426.497.484.892,00 atau 92,56%. Belanja non operasional rinciannya adalah; belanja non operasional sehingga total tahun 2022 pagu Rp3.516.283.014.000,00 realisasinya adalah Rp3.378.768.257.503,00 presentasinya 96,09%.

Kekurangan anggaran KPU untuk tahun 2022 sebanyak Rp4.554.802.720.000,00 direncanakan akan digunakan pembangunan atau perbaikan gedung atau gudang kantor KPU provinsi, kabupaten/kota dan perkembangan IT Kepemiluan KPU.

Selanjutnya untuk anggaran tahun, anggaran KPU tahun 2023 atau tahun ini. Anggaran KPU tahun 2023 ada dua program yaitu: program dukungan manajemen dan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi. Untuk program dukungan manajemen sebanyak Rp2.018.456.627.000,00 dan kemudian untuk program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebanyak

Rp13.969.415.374.000,00 komposisi anggaran berdasarkan program sebagaimana kami bacakan.

Kemudian komposisi anggaran berdasarkan belanja dan belanja operasional pegawai pagunya adalah Rp1.418.599.002.000,00. Dua, belanja operasional kantor Rp402.406.677.000,00 yang ketiga belanja *non* operasional Rp14.166.870.322.000,00 total pagu anggaran Rp15.987.872.001.000,00.

Berdasarkan komposisi anggaran berdasarkan tahapan dan dukungan tahapan uraiannya adalah tahapan pemilu, pagunya adalah sebesar Rp13.952.600.000.000,00 untuk dukungan tahapan pemilu Rp2.035.272.001.000,00. Sumber data surat Kementerian Keuangan No. S821/MK.02/2022 tanggal 4 Oktober 2022 perihal penyampaian alokasi anggaran kementerian lembaga tahun 2023, ini untuk anggaran.

Kemudian, anggaran KPU tahun 2023 untuk yang kolom yang kanan alokasi DIPA KPU sebesar Rp15.987.872.001.000,00 itu untuk membiayai kegiatan tahapan pemilu tahun, pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2023 meliputi:

- Satu, sosialisasi tahapan pemilu atau pilkada;
- Kemudian dua pemuktahiran data pemilih;
- Tiga, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Kemudian keempat kampanye pemilu;
- Yang kelima, logistik pemilu yang mulai disiapkan tahun 2023;
- Yang keenam adalah honor dan operasional Badan *Ad Hoc*;
- Yang ketujuh rekrutmen Anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Untuk tahun 2023 KPU mendapatkan *automatic adjustment* atau blokir sementara sebesar Rp183 miliar dan akan dilakukan buka blokir pada semester dua tahun anggaran 2023.

Yang bagian kiri kebutuhan anggaran KPU tahun 2023 usulan anggaran dibutuhkan KPU tahun 2023 sebanyak Rp23.857.317.226.000,00 sementara alokasi DIPA-nya adalah yang kami sampaikan tadi.

Sampai dengan saat ini realisasi yang sudah dibelanjakan adalah sebesar kurang lebih Rp40,83 triliun, eh *sorry* 40,83% sumber data dari aplikasi sakti per tanggal 12 Mei tahun 2023.

Adapun usulan anggaran dari kebutuhan anggaran yang Rp23,8 triliun sementara dialokasikan Rp15,9 triliun. Kami mengusulkan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan sebesar atau sebanyak Rp7.869.445.225.000,00 ini dalam rangka untuk membayar kekurangan anggaran untuk honor dan operasional Badan *Ad Hoc* yaitu PPK, PPLS, dan PPLN untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2023. Atau dengan kata lain sementara ini yang tersedia anggaran untuk membiayai honor dan operasional PPK, PPLS, dan PPLN baru tersedia sampai dengan bulan Juni 2023.

Saat ini sedang diproses untuk pembahasan penetapan BABUN untuk usulan tambahan anggaran tersebut. Komposisi anggaran KPU tahun 2023 per program:

- Yang pertama program dukungan manajemen usulannya Rp2.139.446.351.000,00 alokasinya adalah Rp2.018.456.627.000,00 masih ada kekurangan sekitar Rp120.989.724.000,00;
- Kemudian yang kedua, program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi relokasi usulan KPU adalah Rp21.717.870.874.000,00. Sementara ini dialokasikan Rp13.969.415.374.000,00 masih terdapat kekurangan Rp7.748.455.500.000,00.

Selanjutnya untuk pagu indikatif anggaran KPU tahun 2024:

- Yang pertama kebutuhan anggaran, usulan anggaran yang dibutuhkan KPU tahun 2024 untuk tahun anggaran 2024 sebanyak Rp44.534.863.833.000,00;
- Dua, pagu indikatif berdasarkan surat edaran bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023, KPU mendapatkan pagu indikatif tahun 2024 sebanyak Rp28.365.496.586.000,00. Dalam pagu indikatif tersebut terdapat anggaran untuk pelaksanaan pilkada gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 sebagaimana kami sampaikan dibagian awal yaitu pilkada gubernur dan wakil gubernur di 4 Provinsi DOB, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya sebanyak Rp974.355.715.000,00 pagu indikatif KPU tahun 2024 untuk pemilu tahun 2024 sebanyak Rp27.391.137.871.000,00, ini artinya setelah dikurangi pagu indikatif untuk Pilkada 4 provinsi DOB. Pagu indikatif KPU tahun 2024 tidak termasuk anggaran pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua.

Selanjutnya rencana kerja KPU tahun 2024.

- Berdasarkan program:
 - Program dukungan manajemen sebanyak Rp2.078.466.358.000,00.
 - Yang kedua, untuk program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebanyak Rp26.287.030.282.000,00.

Total yang diperlukan adalah Rp28.365.496.586.000,00.

- Berdasarkan tahapan untuk tahapan pemilu pagu adalah Rp25.295.183.372.000,00.
 - Dukungan tahapan pemilu Rp2.095.954.499.000,00; dan
 - Anggaran untuk pilkada provinsi, pilkada gubernur untuk empat DOB Provinsi adalah sebesar Rp974.358.715.000,00.

Jadi total pagu anggaran Rp28.365.496.526.000,00.

Pagu indikatif tahun 2024 dialokasikan untuk pemilu sebanyak sebagaimana kami sampaikan tadi akan digunakan untuk pembiayaan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Yang pertama untuk kegiatan sosialisasi penyuluhan dan bimbingan teknis tahapan sebesar Rp132.301.908.000,00;
- Kemudian untuk sarana dan prasarana bidang teknologi informasi, komunikasi dan diklat teknis kepemiluan sebesar Rp370 miliar;

- Kemudian untuk pengelolaan pengadaan laporan dan dokumentasi logistik Rp2.044.400.000.000,00;
- Kemudian untuk pembentukan seleksi honor dan operasional Badan *Ad Hoc* sebesar Rp18.674.999.748.000,00;
- Kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Rp2.602.189.554.000,00;
- Untuk advokasi hukum penyelesaian sengketa pemilu dan penyusunan regulasi sebesar Rp27.304.319.000,00;
 - Untuk kampanye, penetapan hasil dan sumpah janji sebesar Rp886.647.988.000,00;
 - Belanja operasional dan operasional sebesar Rp2.613.334.357.000,00; dan
 - Kemudian untuk pelaksanaan pilkada gubernur dan wakil gubernur untuk 4 provinsi DOB sebesar Rp974.358.715.000,00.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.

Kami kembalikan kepada Pimpinan Komisi II.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Jadi, itu *enggak* sesuai dengan pengajuan selama ini ngutang terus berarti atau gimana?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih Pimpinan.

Sebagaimana kami uraikan khususnya untuk tahun 2022 di bagian bawah anggaran yang kami usulkan sebesar 8 sekitar Rp8 triliun, itu kemudian yang dialokasikan sekitar Rp3,5 triliun, kemudian Rp4,5. Jadi yang Rp4,5 itu dianggarkan untuk kegiatan pembangunan atau perbaikan gedung, gudang, kantor KPU provinsi, kabupaten/kota dan pengembangan IT Kepemiluan. Sehingga karena memang tersedianya apa namanya Rp3,5 miliar maka kami melakukan penyesuaian-penyediaan dalam rangka untuk yang diprioritaskan untuk tahun 2022.

Nah, untuk tahun 2023 yang kekurangan Rp7,8 triliun tersebut, itu adalah apa namanya yang prioritas, kami prioritaskan adalah untuk membayar kekurangan honor dan operasional PPK, PPS dan PPLN. Karena sementara ini yang teranggarkan yang Rp15,9 triliun itu berdasarkan alokasi DIPA menghormati dan mengoperasionalkan Badan *Ad hoc* PPK, PPS, PPLN sampai dengan Bulan Juni 2023 ini. Sehingga ini yang kami mohon supaya ada percepatan sehingga pada Bulan Juni bisa masuk DIPA dan triwulan Juli 2023

sudah dapat dicairkan untuk honor-honor teman-teman Badan *Ad Hoc*, PPK, PPS dan PPLN.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, jadikan, itukan, coba balik lagi tadi yang tadi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Yang 2022?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Nah yang pertama tadi, semuanya dari awal yang 2022, 2023, 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Yang paling awal, gambaran umum.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Nah, ini.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Itukan yang 4,5 fisik ya? Yang tahun 2022 yang ditiadakan fisik.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Betul.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Nah kalau yang tahun 2023 itu kan honor.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Honor, betul.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Nah, terus diakumulasikan. Teman-teman minta lagi 17 sisanya nanti 29 koma sekian kalau ditotal, iya kan, kekurangannya kan 29 ya?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Total, tetapi untuk yang tahun 2024.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

*Iya artinya yang 22 itu yang revisikan sudah *enggak* mungkin lagi itu.*

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Betul yang 4,5.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

*Iya kan, kalau pun dikasih uangnya sekarang, sudah *enggak* mungkin bangun lagi toh?*

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Betul.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Jadi sudah hilang itu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Betul.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Nah, tinggal kebutuhan tinggal 25 lagi dong.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Betul.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya kan tinggal 7 tambah 17.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Sekitar 25 betul.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke. terima kasih.

Bawaslu.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat malam,
Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Ketua Komisi II beserta,
Wakil Ketua Komisi II,
Yang terhormat Anggota Komisi II, kemudian
Pak Mendagri beserta Pak Sekjen,
Ketua KPU beserta Anggota dan Sekjen,
Ketua DKPP beserta jajaran dan,
Anggota Bawaslu beserta Sekretariat Jenderal,

Kami akan menyampaikan beberapa hal tentang anggaran tahun 2022 dan 2023, 2024.

Pada pagu alokasi Bawaslu pada tahun anggaran 2022 pagu Bawaslu adalah Rp1.982.860.804.000,00 berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S909 tanggal 4 Oktober 2021 yang terbagi atas:

- Program dukungan manajemen sebesar Rp1.408.630.827.000,00;
- Operasional pegawai sebanyak 30%, 30,24% Rp426.039.007.000,00; dan
- Kemudian operasional barang 50,72% Rp714.511.627.000,00;
- Kemudian *non* operasional barang Rp268.087.193.000,00 19,03%;
- Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp574.222.977.000,00 yang terbagi atas:
 - Kegiatan non tahapan sebesar Rp153.938.977.000,00; dan
 - Tahapan pengawasan Pemilu Rp420.383.000.000,00 sebesar 73,21% sebagai program prioritas nasional.

Kami mendapatkan *automatic adjustment* tahun anggaran 2022 sebesar Rp99.968.410.000,00 berdasarkan surat Menteri Keuangan S1088 dan S458 tahun 2022 yang terbagi atas dua tahapan:

- Anggaran belanja tambahan Bawaslu tahun anggaran 2022 usulan tambahan Rp1.761.345.480.000,00 terbagi atas:
 - gaji dan tunjangan;
 - seleksi dan honor Panwaslu dan *Ad Hoc*;
 - operasional Panwaslu *Ad Hoc*;
 - sosialisasi pengawasan pemilu, pengawasan pemilu, penerapan anggaran, penyelesaian sengketa dan pengembangan IT pengawas Pemilu.

Persetujuan Kemenkeu sebesar Rp959.924.375.000,00.

- Kemudian ABT yang terbagi atas anggaran belanja tambahan tahap satu sebesar Rp714.719.425.000,00 sebesar 74,46%. Dan ABT tahap dua sebesar Rp243.344.750.000,00. Sehingga total ABT adalah Rp958.064.175.000,00 sebesar 99,81%.

Pagu menjadi Rp2.940.924.979.000,00 kenaikan anggaran adalah 48,32%.

Sedangkan realisasi anggaran tahun anggaran 2022.

Pagu tahun anggaran 2022 Rp2.940.924.979.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp2.598.643.002.539,00 presentase realisasi 88,38%. Sisa anggaran Rp342.281.976.461.000,00.

Realisasi anggaran berdasarkan program tahun anggaran 2022.

Berupa program dukungan manajemen Rp1.468.629.880.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp1.349.781.144.632,00; Presentasinya sebesar 61,91%; Sisa anggarannya Rp118.848.735.368.000,00.

Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp1.472.295.099.000,00. Realisasi anggaran Rp1.248.861.857.907,00 realisasi anggaran sebesar 84,82%. Sisa anggaran Rp223.433.241.093,00.

Total anggaran adalah Rp2.940.924.979.000,00 realisasi anggaran Rp2.598.643.002.539,00. Sisa anggaran Rp342.281.976.461,00.

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja. Pagu Rp506.817.386.000,00; Realisasi Rp481.534.494.305,00; Sisa anggaran Rp25.282.891.695,00 95,01%.

Belanja barang. Pagu Rp2.389.938.304.000,00; Realisasi anggaran Rp2.075.364.120.322,00; Sisa anggaran Rp314.574.183.678,00, realisasi anggaran sebesar 86,84%.

Belanja modal. Pagu anggaran Rp44.169.289.000,00; Realisasi anggaran Rp41.744.387.912,00; Sisa anggaran Rp2.424.901.088,00 realisasinya 94,51%.

Pagu alokasi anggaran Bawaslu tahun anggaran 2023.

Pagu Bawaslu menurut surat Menteri Keuangan Nomor S.821 tanggal 4 Oktober 2022 sebesar Rp7.103.821.817.000,00.

Program dukungan manajemen Rp1.476.140.223.000,00; 29,8% Operasional pegawai Rp444.074.768.000,00; operasional barang 45,69% Rp674.416.488.000,00; Non operasional barang Rp360.648.967.000,00;

Kemudian program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp5.627.681.594.000,00 non tahapannya sebesar yang terealisasi Rp101.581.594.000,00 tahapan pengawasan pemilu Rp5.526.100.000.000,00 sebagai program prioritas nasional.

Kami mendapatkan *automatic adjustment* tahun anggaran 2023 sebesar Rp126.217.745.000,00 realisasi anggaran tahun anggaran 2023 pagunya adalah Rp7.103.821.817.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp2.768.607.033.247,00 kemudian presentase realisasi 38,97%.

Namun per hari ini, per tanggal 25 hari ini sebesar 39,68% *up date* pada hari ini. Sisa anggaran Rp4.335.214.783.753,00.

Program dukungan manajemen Rp1.476.140.223.000,00 realisasi anggaran Rp502.831.259.919,00 prosentasenya 34,06%. Sisa Rp973.308.963.081,00.

Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi Rp5.627.681.594.000,00 realisasi anggaran Rp2.265.782.313.329,00. Sisa anggaran Rp3.361.899.280.671,00.

Totalnya alokasi pagu anggaran tahun 2023 Rp7.103.821.817.000,00 realisasi anggarannya Rp2.768.613.573.248,00. Sisa anggaran Rp4.335.208.243.752,00.

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja tahun 2023.

Pegawai pagu anggaran Rp441.074.770.000,00 realisasinya Rp204.781.047.058,00. Sisa anggaran Rp236.293.729.942,00 46,43%. Pagu untuk belanja barang Rp6.574.362.008.000,00 realisasi Rp2.525.443.001.013,00. Sisa anggaran Rp4.048.919.006.687,00 38,41%, belanja barang.

Belanja modal pagu Rp88.385.039.000,00 realisasi Rp38.382.984.876,00. Sisa Rp50.002.054.124,00 43,43%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 aspek sumber daya manusia, perekrutan Bawaslu provinsi periode 2023-2024 di delapan Provinsi Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan,

Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Utara dan 3 Provinsi Papua, dan 4 di DOB baru.

Kemudian perekrutan Bawaslu Provinsi periode 2023-2028 di 29 provinsi ada penambahan atau seleksi gelombang kedua. Dan kemudian perekrutan dan serta pelantikan sumpah pengambilan sumpah janji Anggota Panwaslu luar negeri yang diperlukan diperwakilan Republik Indonesia dan perekrutan calon Anggota Bawaslu kabupaten/kota periode 2023-2028.

Aspek pengawasan pemilu, apel siaga pengawasan pemilu 2024, sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif, penyusunan alat kerja pengawasan kampanye pemilu 2024, pengawasan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sekaligus DPD. Pengawasan, penguatan daftar pemilih mulai dari tingkat pusat sampai dengan kelurahan dan desa dan pengawasan, penetapan, rekapitulasi daftar pemilih sementara nasional.

Aspek pencegahan dan partisipasi masyarakat, penandatanganan MoU dengan kementerian lembaga dan *stakeholder* pengawasan pemilu sehingga dapat ikut serta dalam mensosialisasikan pengawasan pemilu. Sehingga masyarakat juga dapat ikut serta dalam pengawasan pemilu dan selain itu Bawaslu juga berharap penyelenggaraan pemilu berlangsung aman dan damai.

Aspek penanganan pelanggaran pemilu, peningkatan kapasitas bagi sentra Gakumdu untuk membangun pemahaman yang sama antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan tentang tindak pidana pemilu. Penyusunan dan penetapan peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum dan sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu.

Kami ada catatan terhadap sentra Gakumdu karena honorarium sentra Gakumdu itu hanya 3 bulan menurut Kementerian Keuangan dari Bulan Januari sampai Bulan Maret, sehingga sampai dengan April, sampai dengan Desember 2023 tidak jelas anggaran honorarium buat teman-teman sentra Gakumdu dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Padahal menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 anggaran tersebut ada pada Badan Pengawas Pemilu. Yang kami takutkan akan jadi permasalahan kami dengan teman-teman Kepolisian dan juga Kejaksaan.

Sampai sekarang Kementerian Keuangan masih beranggapan bahwa pokja yang sentra Gakumdu ini hanya bisa berlangsung selama tiga bulan, setelahnya tidak ada jawaban dari teman-teman Kementerian Keuangan terhadap masalah tersebut. Padahal kegiatan sentra Gakumdu sampai dengan pelantikan tahapan pemilu ini selesai.

Kemudian aspek penyelesaian proses sengketa pemilu penerimaan 81 permohonan sengketa proses pemilu. Jumlah permohonan tersebut terbagi di 18 provinsi yang terdiri dari tahap awal verifikasi dan tahap hasil penyelesaian pendaftaran bakal calon Anggota DPD.

Kemudian penyusunan dan penetapan keputusan Bawaslu yang mengatur tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa proses sebagai turunan dari Per-Bawaslu No. 09 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

Aspek hukum dan penyusunan peraturan Bawaslu, penyusunan PerBawaslu nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan juga pembahasan advokasi hukum pencegahan tindak Bawaslu dalam penggunaan hibah pada pemilu tahun 2024.

Aspek selatan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat fungsional PNS angkatan lima Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka penguatan kelembagaan sehingga dapat memberikan dukungan dan fasilitasi kegiatan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dan juga menghadiri Musrenbang dalam rangka penyusunan RPJPN tahun 2025 dan 2045.

Kebutuhan dan pengelolaan anggaran tahun 2023.

Untuk operasional kebutuhan tahun 2023 adalah Rp1.441.386.154.000,00. Kemudian pagu alokasi tahun 2023 adalah Rp1.115.491.256.000,00. Kekurangannya adalah Rp325.894.896.000,00.

Kegiatan non tahapan Rp642.776.624.000,00. Pagu alokasi tahun 2023 Rp462.230.561.000,00 kekurangannya Rp180.546.065.000,00.

Kegiatan tahapan pemilu kebutuhan tahun 2023 adalah Rp11.221.144.635.000,00. Pagu alokasi tahun 2023 adalah Rp5.526.100.000.000,00 kekurangannya Rp5.695.044.635.000,00. Jumlah total keseluruhan kebutuhan tahun 2023 Rp13.305.307.413.000,00.

Pagu alokasi tahun 2023 Rp7.103.821.817.000,00 kekurangan totalnya adalah Rp6.201.485.596.000,00. Ini terbagi atas beberapa program, perencanaan program dan anggaran sifatnya peraturan, dukungan operasional Panwaslu *Ad Hoc*, pemukhtahiran data dan daftar pemilih. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, masa kampanye dan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik, pelatihan saksi partai politik atau peserta pemilu dan pengawasan pemilu tahun 2024 di DOB.

Kemudian tahun anggaran 2024.

Pagu indikatif Bawaslu tahun anggaran 2024 sebesar Rp11.605.527.974.000,00 surat bersama Menteri Keuangan, Menteri Bappenas nomor S287 dan B92 tanggal 10 April 2023 yang terbagi atas program dukungan manajemen Rp1.432.867.258.000,00.

Belanja pegawai Rp553.195.891.000,00. Operasional barang Rp632.576.823.000,00. Non operasional barang Rp247.094.544.000,00. Dan juga program penyelenggaraan pemilu dan dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp10.172.660.716.000,00 non tahapan sebesar

Rp429.977.770.000,00. Tahapan pengawasan pemilu
Rp9.742.682.946.000,00 sebagai program prioritas nasional.

Distribusi pagu indikatif tahun anggaran 2024. Pusat, sebesar Rp286.409.787.000,00. Provinsi, sebesar Rp1.880.545.468.000,00. Untuk kabupaten/kota sebesar Rp2.655.460.849.000,00. Panwaslu *Ad Hoc* Rp6.783.111.870.000,00.

Jadi bisa dilihat bahwa yang paling besar adalah Panwaslu *Ad Hoc* baik di tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024; pengelolaan keuangan BUMN dan umum, pengelolaan administrasi SDM, pemeriksaan dan pengendalian dan pengawasan internal, pengelolaan data dan informasi sebesar Rp1.432.867.258.000,00.

Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Per-Bawaslu, pembentukan dan dukungan operasional Panwaslu *Ad Hoc*, pengawasan pengadaan dan distribusi logistic, pengawasan kampanye pemilu, pengawasan masa tenang dan pengawasan pemunggutan dan penghitungan suara, pengawasan penetapan hasil pemilu, pengawasan pengucapan sumpah janji Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD dan juga pengawasan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2024 sebesar Rp10.172.660.716.000,00.

Kebutuhan dan kekurangan anggaran tahun anggaran 2024 anggaran Pemilu 2024 satu putaran.

Operasional kebutuhan 2024 adalah Rp1.453.887.904.000,00 pagu indikatifnya sebesar Rp1.186.772.714.000,00 kekurangan anggarannya Rp268.115.190.000,00.

Kegiatan non tahapan adalah Rp1.194.928.830.000,00. Pagu indikatif Rp677.072.314.000,00 kekurangannya Rp517.856.516.000,00.

Sedangkan kegiatan tahapan pemilu, kebutuhan tahun 2024 Rp10.375.354.793.000,00 pagu indikatifnya sebesar Rp9.742.682.946.000,00 kekurangannya sebesar Rp632.671.847.000,00.

Kebutuhan alokasi tahun 2024 Rp13.024.171.527.000,00 kemudian pagu indikatif yang ada Rp11.605.527.974.000,00 kekurangannya adalah Rp1.418.643.553.000,00.

Kebutuhan anggaran pemilu tahun 2024 putaran kedua sebesar Rp4.651.666.169.000,00 yang terbagi atas:

- Honorarium dan operasional Panwaslu *Ad Hoc*;
- Pengawasan dan pemukhtahiran data pemilih dan penyusunan data pemilih;
- Pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik;

- Pengawasan masa kampanye;
- Pengawasan masa tenang;
- Pengawasan pemunggutan dan pengawasan penetapan hasil pemilu.

Kami dapat simpulkan bahwa kebutuhan anggaran pemilu tahun 2024 dari mulai tahun anggaran 2022, 2023, sampai dengan tahun anggaran 2024.

Pertama kebutuhan anggaran pemilu untuk tahun anggaran 2022 Rp2.033.278.124.000,00.

- Pagu alokasi atau pagu indikatif Rp420.383.000.000,00;
- Kemudian kekurangan anggaran Rp1.612.895.184.000,00;
- Tambahan anggaran Rp958.064.175.000,00;
- Pagu setelah mendapatkan tambahan anggaran Rp1.378.447.175.000,00.
- Kemudian anggaran pemilu yang belum terpenuhi adalah Rp654.831.009.000,00.

Kemudian tahun anggaran 2023, kebutuhan anggaran pemilu Rp11.221.144.635.000,00.

- Pagu alokasi atau pagu indikatif sebesar Rp5.526.100.000.000,00;
- Kekurangan anggaran Rp5.695.044.635.000,00;
- Tambahan anggaran nol;
- Pagu setelah mendapatkan tambahan anggaran Rp552.006.100.000.000,00.

Kebutuhan anggaran pemilu tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.695.044.635.000,00.

Tahun anggaran 2024 kebutuhan anggaran pemilu Rp10.375.354.793.000,00.

- Pagu indikatifnya Rp9.742.682.946.000,00;
- Kekurangan anggaran Rp632.671.847.000,00;
- Tambahan anggaran nol;
- Kemudian pagu setelah mendapatkan tambahan anggaran Rp9.742.682.946.000,00.

Kebutuhan anggaran pemilu yang tahun anggaran 2024 yang belum terpenuhi Rp632.671.847.000,00 sehingga totalnya kebutuhan anggaran pemilu tahun 2024 Rp23.629.777.612.000,00.

- Sedangkan pagu indikatif total dari mulai 2022 sampai dengan 2023, sampai dengan 2024 Rp15.669.165.946.000,00;
- Kekurangan anggaran Rp7.940.611.666.000,00;
- Tambahan anggaran Rp958.064.175.000,00;
- Pagu setelah mendapatkan anggaran Rp16.647.230.121.000,00.

Sehingga kekurangan total kebutuhan anggaran tahun 2024 dari mulai tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024 adalah Rp6.982.547.000.491,00.

Inilah yang bisa kami sampaikan kepada Ketua dan Wakil Ketua Komisi II beserta anggota Komisi II.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih saudara Ketua Bawaslu.

Bapak/Ibu sekalian,

Setelah kita mendengarkan dari Saudara Mendagri, dari KPU, DKPP dan Bawaslu, cukup jelas semua ya?

Masih ada yang mau bertanya, pendalaman?

Oh iya.

F-GERINDRA (Drs. DIFRIADI):

Pimpinan,

Bang JG.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Difriadi. Iya, Pak Gaus, Pak Ongku, cukup ya? Cukup.

Kita perpanjang dulu sampai jam 22.30 WIB ya Pak Menteri?

Bisa Pak? 22.30 ya?

(RAPAT: SETUJU)

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. DRS. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, B.S., M.S., PH.D.):

Izin sekarang kalau bisa pukul 22.00 kecuali kalau nanti diperpanjang tetapi, iya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Kebanyakan ngetok nanti Pak.

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL POLISI
(PURN) PROF. DRS. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, B.S., M.S., PH.D.):**

Karena kita nanti sebetulnya ada pendalaman di rapat berikutnya yang lebih detail, mungkin hanya hal yang pokok saja.

Terima kasih.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A.,
M.H., M.IP.):**

Sudah saya ketok Pak 22.30 iya.

Baik.

Saudara Menteri Dalam Negeri,

Sebelum ke teman-teman, saya ingin menanyakan di halaman 32 Saudara Menteri, di halaman 4 juga ada ya tetapi saya *concern* di halaman 32 tentang IPDN Pak Menteri.

Ya ini sudah pernah kami tanyakan kepada Saudara Menteri Pak MenPAN ya mengenai kuota, kuota penerimaan praja, praja itu kan mestinya setiap tahun kuotanya itu lebih kurang 1.500 orang yang tersebar di 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Tetapi KemenPAN hanya setuju 534 orang Pak, ya 534 orang. Sementara di halaman 32 itu ya kita bicara tentang indeks kepuasan *stakeholder* terhadap kinerja alumni ya, pemenuhan kebutuhan bahan makanan, ini semua menyangkut anggaran ini Pak ya, menyangkut anggaran.

Nah, pertanyaan kami itu Pak, ini hubungannya tentang anggaran apakah kuota yang 534 itu ya, kan disebut di nomor lima pelaksanaan selektif penerimaan calon praja dengan target 534 orang.

Nah, pertanyaan kami Pak apakah dengan 534 orang ini ya tidak membuat timpang IPDN itu Pak? Karena kalau kita melihat selama ini IPDN itu harus memenuhi ya kebutuhan pemda, begitu ya Pak Menteri, pemda. *Nah*, ini pernah kami tanyakan kepada MenPAN apa alasannya? Apa pertimbangannya?

Karena kalau melihat dari tahun ke tahun, dari tahun 2015 sampai 2022 ini tiket terendah 534. 2015 itu masih 900 formasi, 2016, 900 formasi, 2017 1.600 formasi, jadi naik dia Pak. *Nah*, ini kok bisa menurun, *nah* kira-kira apa kendalanya di sini?

Sehingga MenPAN itu walaupun sesungguhnya menurut data yang ada di kami itu, sesungguhnya ini-ini sudah disetujui oleh bagian SDM di KemenPAN, tetapi sekonyong-konyong muncul surat dari MenPAN mengatakan bahwa kuotanya itu 534 orang dan ini tidak bisa dijawab MenPAN kemarin Pak, makanya kami tanyakan, ya.

Jadi, jangan nanti kita mengeluarkan anggaran cukup besar, membangun IPDN segala macam Pak tetapi dengan kuota yang seminimalis begini kan sayang juga Pak, kita masih memerlukan pamong-pamong itu Pak.

Tolong ini Pak Menteri bisa menjelaskan ini, kira-kira apa apa namanya terobosan Pak Menteri untuk bisa mengembalikan kuota itu Pak, ya itu kan cukup besar Pak Jatinangor, di Sulawesi Utara, tempat lain, cukup besar Pak IPDN. *Nah*, kalau diisi 534 dari sekian banyak IPDN itu Pak, itu sama saja merong-rong secara tersendiri ya, ya aset negara.

Jadi, Pak Menteri ini tidak boleh didiamkan dan kami di Komisi II tetap memperjuangkan supaya kuota itu dikembalikan ya. Kami semua ada solusi yang solutif untuk bisa menyelesaikan ini Pak Menteri.

Terus, saya kira itu kalau untuk Kemendagri, saya *concern* di IPDN saja ya dan ini sudah ramai juga di media Pak mengenai ini.

Nah, kepada KPU, KPU sebagaimana tadi saya diskusi dengan Pak Doly, ini kan yang 2022 saya ulangi Pak, kekurangan 4.544.802 dan ini tidak mungkin kembali lagi Pak. *Nah*, pertanyaan kami Pak, apakah pernah ada surat dari Kementerian Keuangan tentang bagaimana solusi kekurangan ini Pak?

Kita harus hati-hati Pak, hati-hati ini bisa menimbulkan kerugian negara. Kita sudah ketok, sudah ketok, di-*acc* dan Banggar sudah oke, ketika masuk kepada Kementerian Keuangan ternyata ya tidak bisa direalisir Pak.

Nah, pertanyaan saya, pertanyaan kami itu ke mana yang Rp4.544.802.000.000,00 itu Pak uangnya? Pernah *nggak* itu ditanyakan, jadi jangan didiamkan Pak mengenai ini. Iya, kita sudah ketok di Komisi II, sudah masuk ke Banggar sudah diketok Rp76.656.312.294.000,00 iya kan.

2022 itu usulan Rp8 triliun sekian ya, alokasi DIPA 3516 sama dengan 43,6% kekurangan Rp4.544.802.000.000,00 dan seterusnya ini ke mana uangnya?

Ini Saudara Ketua KPU tolong ditelusuri ini Pak, jadi Saudara KPU jangan diamkan ini Pak, jangan didiamkan, tidak boleh didiamkan, karena ini anggaran yang sudah tidak mungkin dikeluarkan lagi Pak. Sementara ini sudah dicatat, sudah terdaftar dalam anggaran KPU, dalam anggaran di Banggar, ini bagaimana? Hati-hati Pak. Jadi, KPU jangan menganggap itu solbi, solbi itu soal biasa Pak, iya istilahnya solbi itu Pak, soal biasa tetapi ini sangat luar biasa.

Pak Ketua KPU,

Tolong hati-hati mengenai ini Pak, ini uang yang cukup sedikit lah Rp4 triliun iya kan. Kita tidak mau ada masalah di kemudian hari Pak, karena Pak Mendagri waktu itu juga hadir waktu kita ketok-ketok barang itu. Ini untuk KPU tolong para komisioner juga, sekjen, tolong tanyakan Pak, minta surat tertulis

dari Kementerian Keuangan bahwa ada kekurangan yang tidak mungkin dibayarkan lagi karena tahun sudah tidak mungkin untuk keluar, kan kita hanya bisa meminta 2023 Pak, kalau mundur *enggak* mungkin lagi. *Nah*, kemana uang yang empat sekian T itu Pak? Ini menggelitik bagi kami ini, tolong dicermati.

Nah, yang kedua kepada KPU, ya di sini disebutkan tentang saran dan prasarana bidang teknologi informasi, ya sebesar Rp370 miliar. Rp370 miliar itu apakah ini sudah bisa meng-cover kerja-kerja KPU sampai ke daerah Pak? Apakah sudah bisa Pak? Meng-cover kerja-kerja KPU sampai ke daerah ini perlu Pak, karena ini kan masih bisa, bisa dirubah sampai nanti minggu depan nanti kita ketemu.

Tolong Pak Ketua KPU, ini dicermati supaya kerja-kerja KPU juga perkara anggaran ini tidak terkendala Pak dan tidak terikut *euforia* terbuka, tertutup, tertunda dan segala macam, ya ini perlu Pak, jangan sampai ke sana *euforia*-nya, ini masalah uang ini sensitif kan begitu, iya kan?

Dengan ke Bawaslu juga begitu ya, di sini saya *enggak* pernah, *enggak* ada melihat mengenai apa anggaran untuk TI-nya atau IT-nya Pak. Bagaimana kerja-kerja Bawaslu itu sangat penting itu sekarang Pak, sekarang dengan IT itu sangat gampang kita bisa bekerja.

Dan tentang honor sentra Gakumdu hanya tiga bulan itu, ya tentu ini menjadi informasi baru kepada kami di sini, supaya Bawaslu juga bisa bersurat secara resmi dan mengajukan juga, kan di sini *enggak* masuk itu Pak, sudah masuk, sudah masuk, di halaman berapa saya *enggak* baca, tadi itu.

BAWASLU RI:

Kami sudah berhubungan dengan DJA sampai sekarang belum ada jawaban.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya saya baca-baca *enggak* ada Pak, sampai ngantuk-ngantuk baca-baca *enggak* ada Pak.

BAWASLU RI:

Siap Pak.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Tolong dimasukkan Pak, karena minggu depan kita masih ketemu. Kita *enggak* mau juga mitra kerja itu terkendala karena anggaran yang sudah, yang sudah kita ketok saja terkendala Pak, apalagi belum diketok. Ini menjadi catatan bagi kami Komisi II tentang anggaran-anggaran para penyelenggara

termasuk KPU ya, yang sudah sah resmi kita ketok, teman-teman sekalian tetapi tidak direalisir ya dan tidak tahu kemana yang sekian triliun itu Pak.

Kita tidak mau Komisi II ini terulang lagi ke masa lalu Pak, ada istilah e-KTP segala macam, hati-hati kita Pak yang begini-begini ya.

Dari saya itu saja.

Silakan, Pak Difriadi.

F-GERINDRA (Drs. DIFRIADI):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang kami hormati Pak Menteri,
Pimpinan KPU, DKPP, Bawaslu dan,
Seluruh kawan-kawan Anggota DPR,

Yang pertama saya mengucapkan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri yang sudah banyak mendapatkan capaian penghargaan dari lembaga-lembaga, saya kira ini patut kita apresiasi dengan cukup tinggi.

Yang kedua, apakah di Kementerian Dalam Negeri sudah dianggarkan tentang kajian *design* besar otonomi daerah? Apakah masuk dalam anggaran ini? Karena ini penting, karena kemarin hasil rapat kita akan membuat *design* besar itu.

Yang ketiga, kita ingin, kan kita tahu Kementerian Dalam Negeri ini anggarannya cuma Rp2 triliun lebih sedikit, sedangkan tanggungjawabnya besar, jadi kalau ada daerah jalan rusak selain Gubernur, Menteri Dalam Negeri Pak yang di, yang di-*anu*, yang tugasnya mengawasi, membina pemerintah daerah itu kena. *Nah*, oleh karena itu tugas Kementerian Dalam Negeri khususnya Dirjen Keuangan Daerah yaitu mengevaluasi rencana APBD Provinsi. *Nah* oleh karena itu evaluasi ini apakah proses anggarannya disediakan cukup dan sehingga menghasilkan evaluasi yang berkualitas. Ini penting supaya ketika muncul isu-isu di daerah tentang kekurangan pembangunan, sehingga kinerja pemerintah itu lemah, tidak tercapai akibat daripada tidak terevaluasinya dengan secara berkualitas RAPBD masing-masing provinsi.

Karena di sana kita bisa melihat, kalau kita evaluasi dia ke infrastruktur berapa biayanya kemungkinan ke aksesoris saja APBD itu. Kadang-kadangan tidak substantif itu kalau dikontrolnya kita kurang kuat di evaluasi RAPBD provinsi. *Nah*, oleh karena itu kami berharap ingin menjadi catatan penting untuk penganggaran secara berkualitas, evaluasi pada APBD provinsi.

Kemudian, yang terakhir untuk KPU, Bawaslu dan semua ini, saya masih bingung ini, menentukan pagu indikatif itu apa dasarnya? *Enggak* kan Menteri Keuangan ini, yang menentukan apa dasarnya? Apakah usulan kementerian lembaga duluan masuk baru dia kasih pagu indikatif atau pagu indikatif duluan baru usulan K/L itu yang disetujui?

Jadi, kalau umpamanya usulan K/L itu disampaikan kepada Menteri Keuangan duluan baru pagu indikatif, saya kita itu berdasarkan kebutuhan, kebutuhan tetapi kalau pagu indikatif duluan itu bagi-bagi pembiayaan. Jadi, itu saja cara berpikir kita.

Yang terakhir ini ada aspirasi dari daerah khususnya para petugas KPU dan Bawaslu, waktu kami kemarin ke daerah. Ini saya *enggak* mengikuti cuma ada katanya penghargaan untuk para purnatugas ini. Apakah ini bisa dianggarkan, diperjuangkan? Kalau itu memang janji kita, saya kira memang harus ditepati. Bagaimana mekanismenya barangkali semua bisa diselesaikan secara baik.

Saya kira itu saja, terima kasih Pimpinan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya walau pun tengah malam, saya kira ini menjadi bagian daripada ikhtiar kita untuk memperbaiki bangsa.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Difriadi.

Silakan Buya Gaus.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Menteri Dalam Negeri yang saya hormati beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini,
Pak Ketua KPU beserta seluruh jajaran termasuk Pak Sekjen,
Ketua Bawaslu beserta seluruh komisioner dan Eselon I Pak Sekjen beserta jajaran,
Pak Ketua DKPP,
Hadirin dan hadirat yang berbahagia,

Saya perlu menyampaikan pada forum yang berbahagia ini bahwa pembahasan anggaran 2024 pada malam hari ini, ini adalah yang kementerian dan lembaga pada malam ini ada empat, tadi siang sudah kita bicarakan tiga kelembagaan.

Dari tujuh kementerian dan lembaga yang sudah kita lakukan pembahasan di Komisi II ini, secara terus menerus sejak saya di DPR RI ini, di Komisi II, berdiri bulu roma saya ini Pak Menteri, Kementerian Dalam Negeri sangat-sangat luar biasa, ini bukan karena di depan Pak Menteri, saya catat ini Pak Menteri, banyak ini yang mau disampaikan.

Di mana dari empat kementerian dan lembaga yang ini salah satu contoh, satu-satunya kementerian dan lembaga menyampaikan *progress report* tentang keberhasilan, hanya Kementerian Dalam Negeri. Salah satu contoh misalkan, ada empat belas *reward* yang didapatkan dan itu selalu dipertahankan dan saya catat itu, di halaman pertama dan seterusnya.

Sedangkan KPU, Bawaslu, DKPP apakah juga ada mendapatkan *reward* atau tidak, saya tidak tahu, karena memang tidak ada laporan yang disampaikan.

Di pembahasan siang tadi ada LAN, ada ANRI, ada Ombudsman yang mendapatkan *reward* adalah Lembaga Administrasi Negara jumlahnya sembilan, Kementerian Dalam Negeri adalah sebanyak empat belas. Jadi, memang Kementerian Dalam Negeri ini memang *the best* tentu saya memberikan apresiasi kepada Pak Tito yang secara terus menerus mempertahankan apa yang sudah ditoreh oleh Pak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Beliau juga memberikan sesuatu torehan yang sangat luar biasa.

Begitu juga tentang realisasi anggaran, dibandingkan dengan yang lain tentu jauh lebih besar, tadi dikatakan sedang, 99,11% melebihi rata-rata pemakai anggaran realisasinya, baik kementerian lembaga besar, kecil, menengah dan seterusnya. Rata-rata ini juga disampaikan, saya catat ini.

Nah, oleh karena itu tentu kita berharap bagaimana Pak Menteri Dalam Negeri sebagai pembina kabupaten/kota dan Pak Polisi bisa menularkan keberhasilan dan dedikasi untuk bangsa dan negara ini, tidak hanya di Kementerian Dalam Negeri tetapi menjadi suri tauladan bagi gubernur, bupati dan walikota apa yang ditoreh oleh kementerian ini.

Begitu juga terhadap realisasi anggaran 2023, paling tinggi tadi adalah Ombudsman walau pun anggaran sangat kecil 230M, ANRI 31%, LAN 30,99%. Menteri Dalam Negeri dengan anggaran 3,142T mampu merealisasikan pada Mei ini adalah 39,45% anggarannya sangat luar biasa. Inilah yang saya ingin masukkan adalah bagaimana mitra kami ini saling ber-*fastabiqul khairat*, berlomba-lomba untuk meraih prestasi dari berbagai aspek, baik anggaran, kinerja, *progress report* dan *output-output outcome* dan lain sebagainya, itu yang pertama yang saya lihat.

Sekarang ini Kementerian Dalam Negeri yang mendapatkan pagu indikatif adalah 3,09T. Hari ini saya tidak mendapatkan informasi dari Menteri Dalam Negeri, biasanya perlu ada tambahan anggaran, kecuali ada daerah apa, daerah pinggirannya tadi yang diminta, kecuali itu.

Sedangkan yang berkaitan tentang kelembagaan Kementerian Dalam Negeri kalau dulu malah hampir-hampir nilainya mendekati dengan pagu anggaran, tetapi saya melihat pada hari ini tidak ada permintaan dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penambahan anggaran. Hal ini disebabkan apa? Apakah trauma atau memang ya trauma karena anggaran dulu tidak diakomodir atau memang *progress report* ataupun program-program yang merupakan visi, misalnya Pak Presiden itu rasa-rasanya sudah melampaui dari apa yang menjadi tugas, fungsi, wewenang kementerian ini. Sehingga tidak perlu penambahan anggaran di tahun 2024 yang merupakan akhir daripada masa jabatan Bapak Presiden ini.

Yang kedua adalah BNPP, tadi dikatakan, *nah* ini saya lanjut, nilainya juga tidak mengecewakan, realisasi anggarannya memang di bawah Kementerian Dalam Negeri, walaupun ini di bawah Kementerian Dalam Negeri 97,90% pemakaian anggaran tahun 2022 sedangkan 2023 35,85% di bawah dari Kementerian Dalam Negeri walaupun ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tugas, fungsi, wewenang daripada Menteri Dalam Negeri dan juga dikatakan bahwa kekurangan anggaran di tahun 2024 yang di pagu indikatif adalah 231 sedangkan permintaannya belum mencukupi, masih kurang 6,9%, ini yang saya catat. Itu yang pertama untuk Pak Menteri Dalam Negeri.

Tentu saya berharap kepada kementerian lembaga, mitra daripada Komisi II, kita berharap besok kita akan melakukan hal yang sama dengan kementerian lembaga yang lain. Saya berharap apa yang sudah ditoreh oleh Kementerian Dalam Negeri juga sama dengan kementerian-kementerian lembaga, sebagaimana saya katakan, mudah-mudahan *ber-fastabiqul khairat* berlomba-lomba untuk mencari sesuatu yang membanggakan.

Kemudian, KPU tadi dikatakan dan juga sudah diulas oleh Pak Ketua tadi betul apa yang beliau sampaikan bahwa tahun 2022, saya ingat betul ketika itu yang diusulkan adalah tiga belas. Pertama, dulu, awal, kita pangkas menjadi delapan, delapan pun yang diapa, disetujui oleh Kementerian Keuangan bersama Badan Anggaran adalah 3,5.

Memang banyak hal yang dilakukan pemangkasan itu, pertama adalah pengadaan kantor, pengadaan gudang, pengadaan mobil, saya ingat betul itu Rp276 miliar sekian.

Kemudian juga terhadap anggaran *Ad Hoc*, panitia *Ad Hoc* dilakukan pemangkasan, artinya adalah uang ini ke mana? Memang secara global itu kita sepakati anggaran yang diperlukan oleh KPU adalah sebanyak 76 secara global. Lalu dipreteli per pemakai tahun anggaran, inilah yang disahkan, artinya memang karena ini yang disahkan berarti tidak ada kekurangan anggaran di

tahun 2022. Tidak ada kekurangan anggaran karena sudah terealisasi dan pertanggungjawaban juga sudah disampaikan.

Nah persoalannya hari ini adalah saya setuju kalau seandainya dikatakan oleh KPU bahwa usulan yang disampaikan 23T lebih baru direalisasikan yang disetujui oleh Menteri Keuangan bersama Badan Anggaran adalah 15,987 terjadi kekurangan terhadap anggaran 2023 ini sebanyak 7,8.

Nah, yang ingin saya tanyakan adalah selama pengalaman saya kita di sini, agaknya Menteri Keuangan bersama Badan Anggaran selalu saja tidak pernah memenuhi kebutuhan usulan, kebutuhan usulan, bukan kebutuhan ya, kebutuhan usulan yang diajukan oleh kementerian dan lembaga. Karena ini adalah kerja-kerja dalam menghadapi pemilu 2024.

Bagaimana proyeksi dan prediksi KPU manakala anggaran yang diusulkan adalah 23 tetapi tidak dilakukan *anu* dalam perubahan anggaran tidak dilakukan penambahan, tetap anggaran itu sebagaimana pagu anggaran yang sudah dialokasikan itu sebanyak 15. Kira-kira apa yang akan menjadi persoalan bagi KPU dalam melakukan kerja-kerja untuk menghadapi pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari itu?

Yang berikutnya adalah tentang anggaran tahun 2024. Saya tolong dimintakan pencerahan bahwa Pemilu itu 14 Februari, awal tahun tetapi anggarannya malah lebih besar dari pada 2023 yang sarat dengan berbagai kegiatan.

Anggaran yang paling banyak menurut bayangan saya mudah-mudahan bisa diberikan pencerahan juga kepada kami. Menurut saya ini yang tahapan-tahapan pemilu itu saratnya di sini. *Nah* di 2024 anggarannya malah lebih besar daripada 2023, daripada 2023. Anggaran 2024 itu adalah sebanyak 27 pagu anggarannya, sedangkan di 2023 adalah 15. Hampir separuh dari anggaran 2023, ini saya sampaikan.

Pertama 2023 itu pagu anggaran yang disahkan oleh Menteri Keuangan adalah 15,987T, kegiatan KPU sangat sarat dan saya sangat paham dengan hal itu. Namun di 2024 usulannya adalah 44T. Pagu indikatif yang ditentukan Menteri Keuangan adalah 27T.

Dan saya tidak mendengar laporan seperti Bawaslu. Bawaslu mengatakan kalau seandainya terjadi dua putaran, tolong minta tambahan bantuan untuk putaran yang kedua itu.

Yang ingin saya tanyakan adalah berikutnya Pak Hasyim Asyari adinda yang gagah, apakah yang 27T itu juga sudah termasuk kalau seandainya Pilpres itu terjadi dua putaran atau bagaimana?

Karena dalam laporan yang saya baca ini tidak ada menjelaskan tentang hal itu, kecuali Bawaslu memang meminta anggarannya yang sebentar lagi juga akan saya lakukan pembahasan terhadap itu.

Nah, dalam kinerjanya saya juga tidak menampakkan seperti Pak Menteri Dalam Negeri. Apakah WTP selama ini bagaimana, tentu ini juga kami mendapatkan laporan kinerjanya itu, salah satu bentuk dari pertanggungjawaban adalah sebagaimana yang diraih oleh kementerian dan lembaga lain seperti Menteri Dalam Negeri yaitu wajar tanpa pengecualian. Di mana selama delapan kali berturut-turut.

Kalau di LAN tadi tiga kali berturut-turut dan lain sebagainya. Bagaimana pula dengan KPU ini, ini adalah juga bagian dari kinerja dari KPU. Bagaimanapun kami Komisi II tentu mendorong bahwa KPU pun dalam membahas anggaran dan pemakai anggaran, kemudian kerja-kerjanya juga mendapatkan sesuatu yang *the best*.

Ini kita lihat bahwa KPU realisasi anggarannya adalah 96, dibandingkan dengan kawan-kawan yang pagi tadi, saya lihat memang ya di bawah rata-rata, ada yang 97 tadi, ada yang 96, ada yang 95. Sedangkan KPU adalah 96, tentu saya juga tidak bisa membandingkannya karena anggarannya kecil. Tetapi manakala dibandingkan dengan Menteri Dalam Negeri tentu kita harus ber-*fastabiqul khairat* untuk juga capaiannya melebihi daripada 99%.

Tetapi saya juga memberikan apresiasi, realisasi anggaran tahun 2023 ini saya lihat mungkin KPU yang paling tinggi pemakaian anggarannya Pak Hasyim, yaitu sebanyak 40,83% dan saya detaili dari yang lain-lain itu dari tujuh pemakaian anggaran yang sudah kita bahas sampai dengan malam ini. Memang KPU saya lihat realisasi anggaran ini paling bagus, paling *the best* mudah-mudahan bisa mempertahankan sampai akhir tahun anggaran mencapai seperti apa yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian di sini juga dilakukan untuk minta tambahan anggaran dan saya jura menyimak bahwa ada anggaran 974M untuk pelaksanaan pilkada di empat provinsi yang kita lakukan pemekaran, sehingga jumlah anggarannya itu adalah bukan hanya 27 menjadi 28 koma sekian T yang selain itu adalah sebanyak 27 koma sekian T.

Kemudian Bawaslu tadi sudah agak saya singgung tadi. Saya memang sedih manakala tadi meminta tambahan anggaran, dikasih anggaran malah keteter. Saya buktikan keteternya itu apa? Pada tahun 2022 hanya 88,36% mampu merealisasikan anggaran itu, sehingga apa? Ada kelebihan anggaran 400M, 400M itu tidak sedikit.

Karena apa, ANRI cuma butuh anggarannya 2,86 miliar, kemudian Ombudsman 230, LAN cuman 334 sedangkan Bawaslu hanya mampu merealisasikan anggaran di tahun 2022 itu 88,36% sebanding dengan lebih kurang 400 miliar.

Oleh karena itu tentu saya mengingatkan kepada Pak Bagja yang gagah ini, untuk juga berhati-hati, untuk juga serius dalam menyikapi kinerja yang pengalaman 2022 itu jangan sampai terulang kembali. Sebab kerja-kerja Bawaslu di 2023 ini sangat sarat dengan kegiatan sehingga jangan sampai realisasi anggarannya seperti di tahun 2022.

Kemudian realisasi anggaran di 2023 adalah 38 dibandingkan dengan KPU, dengan Kementerian Dalam Negeri memang dibawah dairpada Kementerian Dalam Negeri karena 39,45, dibanding KPU lebih di bawah lagi 40,83%.

Dan saya juga tadi sudah saya ingatkan kepada, kepada KPU, sedangkan Pak Bagja di sini juga menyampaikan putaran kedua itu kalau seandainya pilpres terjadi putaran kedua beliau meminta anggarannya itu 4,651 triliun. Ini saya baca ini putaran kedua pilpres coba dikoreksi kalau saya salah mohon maaf tolong dikoreksi, saya baca di kalimat terakhir.

Kemudian DKPP sangat luar biasa, saya memberikan apresiasi walau pun anggarannya sangat-sangat kecil yaitu cuma 27M. Tidak sebandingdengan kementerian dan lembaga. Dan *Alhamdulillah* pencapaiannya paling luar biasa, nilainya nomor satu 99,49 tetapi saya tidak mendapatkan apa saja *reward* yang diperoleh dan bagaimana pula pelaksanaan daripada anggaran itu. Apakah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian? Dan bagaimana pula *progress report*-nya itu?

Alhamdulillah pada tahun ini anggarannya adalah 92M dan kenaikannya sangat fantastis, lebih tiga setengah kali lipat dan sangat rasional. Di 2024 hanya meminta, yang disahkan pagu anggarannya 67. Artinya karena sarat kegiatan itu yang paling padat itu kan di tahun 2023. Tetapi saya tidak paham dengan KPU kenapa yang di tahun 2024 malah lebih besar? Padahal harusnya sarat kegiatan di 2023 tetapi di DKPP saya lihat sangat rasional dan realisasinya sangat kecil 2023 ini adalah 17,32.

Barangkali demikian Pimpinan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita dalam rangka membangun dan melaksanakan tugas, fungsi, wewenang kita sebagai orang yang diberi amanah untuk melakukan pembahasan terhadap anggaran.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Gaus.

Yang terakhir Pak Ongku.

F-PD (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Saya sebentar saja Pak.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ya silakan Pak, lama juga *enggak* apa-apa Pak.

F-PD (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Sudah habis waktunya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Bisa perpanjang Pak.

F-PD (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Terima kasih Pimpinan, terima kasih.

Yang saya hormati Pak Menteri,
Ketua DKPP,
Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan jajaran semua dan,
Rekan-rekan Komisi II,

Saya *enggak* akan sepanjang kawan-kawan tetapi karena menurut saya ini adalah baru paparan yang pertama, sebagaimana Pak Menteri sampaikan tadi masih sangat terbatas waktu kita untuk menganalisis isi daripada paparan ini.

Saya pribadi mungkin kemampuan saya tidak setajam kawan-kawan yang lain sehingga saya butuh waktu Pak Menteri, tetapi ada satu hal untuk Pak Menteri Dalam Negeri yang saya lihat di sini perhatian saya adalah untuk anggaran perbatasan Pak ya. Badan Nasional apa itu Perbatasan BNPP ya namanya ya? Saya lihat kok anggarannya kecil sekali, apalagi untuk infrastruktur.

Perbatasan kita inikan luas sekali ya Indonesia ini ya, daerah perbatasannya luas dan kita punya sejarah buruk mengenai pencaplokan wilayah kita, karena adanya daerah-daerah perbatasan yang tidak terurus dengan benar oleh kita, akhirnya diurus orang lain. Sehingga kalau kita masuk ke pengadilan internasional akhirnya kita kalah. Ini pengalaman Sipadan Ligitan kalau saya tidak salah dan belakangan kita dengar ada semacam gerakkan-gerakkan di Laut China Selatan dan seterusnya.

Jadi, saya sih belum, tidak membedah semua apa yang disampaikan Pak Menteri ini, tadi sekilas mata saya terlihat, melihat ke masalah perbatasan ini kok anggarannya yang diajukan sangat kecil menurut saya. Jadi, barangkali ini Pak Menteri, siapa tahu masih ada waktu untuk memperbaiki, bagaimana supaya kita buat daerah perbatasan kita ini menjadi daerah yang membuat orang lain iri begitu. Saya pernah menyesalkan kenapa Timor-Timor itu lepas karena dulu itu yang kita bangun Timor-Timornya, bukan yang kita bangun itu

daerah Kupang, seandainya yang kita bangun itu Kupang berimbang dengan Timor-Timor mungkin tidak lepas Timor-Timor. *Nah*, tetapi karena kita yang bangun Timor-Timor, Kupangnya tidak kita bangun, mereka bilang, wah kami sudah enak, ngapain kami di Indonesia lagi. Saya pikir ya pulau-pulau terluar atau perbatasan kita ini justru yang kita harus bangun, sehingga orang lain melihatnya baik, begitu. Saya pikir ini buat Pak Menteri Dalam Negeri, lainnya nanti kita bahas berikutnya setelah kita dalam lagi lebih lanjut.

Kemudian untuk KPU dan Bawaslu, saya pikir sih, saya sama dengan yang lain-lain lah mengatakan bahwa di sini dipaparkan anggaran 2022, menurut saya kurang relevan, jadi harusnya itu di-*take out* saja kita bahas 2023 dan apa yang akan direncanakan di 2024 ya.

Secara umum saya lihat tadi di khusus Bawaslu Pak, itu mengenai disini saya lihat didalam tabel satu halaman berapa ini, ada kekurangan anggaran untuk kegiatan pengawasan tahapan pemilu 2024 pada tahun anggaran 2023. Ini saya *enggak* tahu, kenapa ini ditinggalkan, *item* dua a itu, sosialisasi pengawasan pemilu 400 kali, sengaja dibikin huruf tebal. Apakah ini pancingan kepada Komisi II supaya ini diusulkan begitu ya? Di sini disebutkan 400 kali ini, apa namanya sosialisasi.

Kita dapat informasi, kita belum jelas ini, berapa kali sih sebetulnya kita mendapatkan sosialisasi per orang ini ya. Ya dibagi jumlah anggota ini kira-kira, apakah sepuluh atau mungkin Pimpinan lain dan Anggota lain, sehingga kita dapat berapa. Ini apakah sengaja ditinggalkan supaya kita ikut berjuang supaya ini, karena cuma ini yang ditinggalkan Pak, ini saya cuma lihat saja, kenapa cuma ini yang ditinggalkan didalam tabel ini, yang lainnya tidak ditinggalkan Pak Pimpinan. Jadi, apa maksudnya ini, yang terkandung didalamnya apa? Tetapi kita mendukung Pak, karena menurut kami sosialisasi ini penting dan kita punya waktu sudah sangat terbatas, dan kita punya sosialisasi waktu ini paling sampai September, setelah itu November masih boleh ya awal ya, setelah itu masuk masa kampanye sudah *enggak* boleh, nanti semua orang kita kena sempit nanti.

Jadi, ini ya mungkin apakah ini fokusnya ke situ dan ini kita mohon kejelasan juga Pak Ketua Bawaslu Pak Bagja ya. Ya saya kira itu, kemudian DKPP Pak ini sedikit saja, tadi Pak Gaus menyampaikan apresiasi untuk 2022 dan seterusnya tetapi 2023 ini kok serapannya baru 17% Pak. *Nah* ini bagus-bagus saja, kalau, karena saya lihat di sini adalah perkara hukum lembaga itu serapannya cuma 6,2. Artinya semua berjalan baik-baik saja sehingga tidak ada perkara, itu bagus-bagus saja. Itu kita, apa namanya bersyukur ya bahwa tidak ada perkara yang signifikan.

Tetapi sebaliknya di bagian kerjasama meskipun anggarannya cuma sedikit, sudah habis ini 94,45% jadi *enggak* ada lagi yang bisa dilakukan kerjasama dari sini akhir tahun ini kelihatannya. Jadi, ini saya lihat apakah bisa digeser yang dari perkara ini bisa digeser ke atas dan seterusnya, sehingga masih bisa dijalankan. Karena secara logika seperti yang Pak Gaus juga sampaikan tadi Kementerian Dalam Negeri sekarang baru bulan mei, seyogyanya kalau kita ambil linier ya seperli, lima per dua belas Pak anggaran

yang kepakai atau empat per dua belas ya, sepertiga lah, 35%, 37%, 39% okelah. Tetapi kalau sudah Sembilan puluh empat persen begini sudah *enggak* ada lagi ini, *enggak* ada lagi ruang gerak. Sebaliknya yang bagian perkara hukum lembaga ini baru enam persen, ya bagus berarti tidak ada perkara. Artinya semua berjalan baik ya tidak ada gugatan, tidak ada macam-macam dan sebagainya, bagus-bagus saja. Mohon dilihat lagi Pak, kalau memang masih bisa digeser ya *alhamdulillah* digeser supaya yang lainnya kerjasama masih bisa dijalankan.

Barangkali begitu Pimpinan, saya singkat-singkat saja, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Silakan yang terakhir dari meja pimpinan Pak Yanuar.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Mendagri,
Teman-teman KPU, Bawaslu dan DKPP,

Saya mungkin *enggak* panjang, tiga hal saja, izin ini ke Pak Menteri semuanya, ini usulan cepat saja Pak Menteri.

Yang pertama ini untuk anggaran 2024, saya hanya mengusulkan saja ini pelatihan untuk aparat pemerintahan desa, jika masih memungkinkan ditambah jumlah apa, target pesertanya. Saya lihat di sini target peserta kurang lebih 1.000 orang, apa memungkinkan masih di-*up*, kenapa? Alasannya sederhana, kita masih memerlukan percepatan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur.

Yang kedua terkait soal *design* penataan otonomi daerah Pak Menteri, ini sebetulnya gagasan lama yang sering kita diskusikan di sini bahkan Pak Mendagri sebelumnya, Pak Tjahjo juga dan bahkan sebelum Pak Tjahjo juga ide ini terus kita bahas. Terus kita diskusikan tetapi sampai hari ini memang *enggak* tahu di mana duduk perkaranya. Saya ingat betul pada beberapa waktu yang lalu pernah ada *draft* awal ya tentang *design* penataan otonomi daerah.

Di Indonesia ini kan ada beberapa provinsi, berapa kabupaten/kota dan seterusnya, mungkin kami ingin tahu perkembangannya sejauhmana Pak Menteri, kenapa? Karena *existing* hari ini dari berbagai daerah, dari berbagai provinsi, kabupaten/kota banyak sekali usulan, sehingga kita pun perlu

memberikan semacam apa istilahnya itu? *Guidance* bahwa pada waktunya kita akan menata ini jauh lebih komprehensif, jauh lebih kuat dan jauh lebih mendalam. Itu yang kedua Pak Menteri.

Yang ketiga, yang terakhir, perjalanan soal dana parpol Pak Menteri, ini adalah topik lama juga yang pernah kita diskusikan, bahkan di ruangan ini juga seingat saya dulu juga Pak Menteri pernah menyampaikan naik tiga kali lipat, terakhir naik itu 2018 dari 108 menjadi 1.000, kemudian kita diskusi soal itu. Dan bahkan seingat saya KPK dan LIPI pernah melakukan riset khusus soal ini. LIPI bahkan dan KPK mengusulkan kenaikan itu sampai angka dari 1.000 menjadi 8.000 menurut mereka itu, karena alasannya satu suara itu biayanya sekitar 16.000.

Nah, tetapi waktu itu usulan ini juga disalahpahami oleh publik, saya kira pada waktu itu, saya membaca juga perkembangan respon publik terkait ini. Padahal kita tahu waktu itu kenaikan anggaran ini tidak untuk kampanye partai politik, jadi jauh lebih banyak untuk pendidikan politik yang menjadi tugas, tanggungjawab, salah satu fungsi partai politik. Tetapi saya juga *enggak* tahu bagaimana perkembangan soal ini, tetapi tidak ada salahnya jika hal ini juga menjadi perhatian ulang kita semua terkait soal yang satu ini. Apalagi jika mengingat di berbagai negara juga soal *support* dan bantuan negara kepada partai politik juga hampir 50% lebih negara di dunia memberikan *support* kepada partai politik. Tetapi tentu saja Indonesia disesuaikan dengan keadaannya. Ini supaya kita tidak salah paham, publik juga tidak menyalahpahami ini bahwa dana ini bukan untuk kontestasi atau kampanye partai politik tetapi lebih kepada pendidikan politik masyarakat melalui partai politik.

Saya kira itu saja Pak Menteri, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Yanuar.

Cukup ya?

Silakan Pak Menteri kalau memberikan tanggapan, singkat saja Pak.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. DR. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, B.S., M.S., PH.D.):

Baik, terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya, silakan Pak.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. DRS. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, B.S., M.S., PH.D.):

Ini agak panjang karena totalnya lima panjang-panjang, mohon izin.

Jadi, yang pertama langsung saja, ke inti-intinya dari Pak Junimart Girsang tadi masalah IPDN, memang formasi sesuai tahun anggaran 2023 itu tahun lalu itu disetujui sebanyak 1.230 praja. Namun pada awal tahun terjadi diskursi di pemerintah, KemenPAN RB melalui BKN, kemudian juga dari Kemendagri, Kemendikbud dan kami juga mendapat arahan dari Bapak Presiden, bahwa kita perlu juga untuk merubah *mindset* cara berpikir kita tentang IPDN. Karena IPDN ini adalah ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan ini juga ada di beberapa universitas yang menghasilkan sarjana ilmu pemerintahan.

Nah kemudian kalau kita melihat kurikulum di IPDN berlangsung selama empat tahun mereka fokus ilmu yang dipelajari adalah ilmu pemerintahan. Dalam perkembangan dinamika di lapangan, kita tahu bahwa Indonesia sangat beragam sekali, berbeda dari satu tempat ke tempat lain, kebutuhan juga berbeda-beda. Memerlukan bukan hanya seorang generalis tetapi memerlukan para ASN yang dia adalah spesialis, sesuai dengan karakteristik daerah itu. Ini diskusi kami dengan Bapak Presiden, dengan Mensesneg dan lain-lain MenPAN.

Contoh misalnya daerah perairan, itu memerlukan sarjana-sarjana kelautan, sarjana perikanan dan lain-lain yang sesuai dengan itu. Daerah-daerah yang ada hutan, sarjana-sarjana kehutanan untuk mengali potensi, mereka memiliki pemikiran apa namanya itu? Ide-idenya banyak karena memang sekolahnya di situ. Dan daerah misalnya pertambangan, perlu sarjana-sarjana pertambangan ASN pertambangan yang menguasai tentang bidang itu di daerah yang memang potensinya adalah itu. Sarjana ilmu pariwisata dan lain-lain untuk mendorong, menghidupkan kepariwisataan di daerah itu yang mungkin terpendam. *Nah*, ini yang memang tidak diajarkan memang di IPDN, IPDN ini adalah mengajarkan ilmu pemerintahan secara umum, *general*, sehingga menjadi seorang generalis tentang ilmu pemerintahan, meskipun spesialis di bidang ilmu pemerintahan. Tetapi tidak memiliki apa namanya itu, belum tentu *applicable*, belum tentu cocok dengan semua seluruh Indonesia yang berbeda-beda karakteristik wilayahnya.

Oleh karena itu dalam diskusi dengan Bapak Presiden, beliau menginginkan agar IPDN ini tidak hanya merekrut dari tamatan SMA, dididik selama empat tahun, kemudian menjadi sarjana terapan ilmu pemerintahan, dia menjadi seorang generalis.

Oleh karena itu perlu juga direkrut para sarjana-sarjana yang dari ilmu spesialis dan kemudian mereka dididik di IPDN, mungkin sekitar enam bulan atau mungkin satu tahun, untuk melengkapi mereka dengan kemampuan ilmu pemerintahan. Ini ide dasar yang kami lihat adalah perubahan penting, ini kami kira juga positif.

Oleh karena itu di tahun ini formasi yang di, untuk direkrut yang untuk empat tahun, kenapa empat tahun ini perlu terus di, perlu-perlu diadakan? Dia menjadi pondasi, IPDN ini menjadi pondasi ilmu pemerintahan S1, Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan. Kalau ada pondasinya maka S2 dan S3 yang ada di IPDN di Jalan Ampera Raya di Pasar Minggu itu bisa bertahan. Karena kalau seandainya tidak ada landasan *platform* S1-nya, ya otomatis S2 dan S3-nya bisa tidak ada. *Nah*, oleh karena itu formasi 534 orang memang dididik untuk empat tahun.

Nah anggaran, ini yang perlu dihitung, anggaran yang perlu dihitung 534 orang ini memerlukan biaya berapa dari pagu yang sudah ada. *Nah*, sisa pagunya itu ini yang sedang dirapat tekniskan untuk merekrut sarjana-sarjana spesialis yang kemudian dilengkapi dengan ilmu pemerintahan tetapi tidak menjadi Sarjana Ilmu Pemerintahan. Karena Sarjana Ilmu Pemerintahan harus empat tahun, itu Kemendikbud. Jadi mungkin enam bulan atau satu tahun prinsip memiliki dasar-dasar ilmu tentang pemerintahan, ilmu tentang penyusunan perencanaan pembangunan, perencanaan APBD misalnya, ilmu tentang untuk keuangan daerah, ilmu tentang kedukcapilan dan lain-lain, inspektorat misalnya.

Nah, ini-ini yang dibuat dua-dua jalur. Jalur yang pertama adalah yang memang 534 ambil dari *fresh graduate* SMA, mereka yang terbaik, dididik empat tahun menjadi *generalis* ilmu pemerintahan dan mereka menjadi *platform* untuk S2 dan S3 yang ada di Pejaten.

Kemudian yang kedua adalah rekrutmen dari para spesialis, *nah* ini kita ada *problem*, ini juga mohon bisa kiranya untuk jadi masukkan Bapak-bapak dan Ibu di Komisi II, ini betul-betul kajian dan pendapat saya sangat penting sekali untuk bangsa ini. Dan ini nanti juga menjawab pertanyaan mengenai tadi apa namanya itu anggaran infrastruktur misalnya, bagaimana evaluasinya.

Ada persoalan yang sangat mendasar saya kira, yaitu perlu kita kaji kembali. Sebetulnya berapa jumlah ASN yang harus ada baik yang ASN atau pun yang kontrak, yang honorer dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau Bapak-bapak dan Ibu datang ke wilayah, tolong betul-betul diminta datanya, mengenai data APBD-nya.

Kita melihat ada tiga kategori APBD, kemampuan fiskal daerah, daerah yang kuat APBD-nya, kemampuan fiskalnya itu ditandai dengan PAD-nya yang lebih tinggi daripada transfer pusat. Contohnya misalnya Badung di apa di Bali sekitar Denpasar, Kuta dan lain-lain, itu anggarannya Rp6,3 triliun, itu PAD-nya Rp4,6 atau Rp4,7 triliun PAD-nya, transfernya hanya 1,6 Rp1,7, itu kuat. Sehingga bisa membangun jalan, bisa membangun dan lain-lain, pendidikan,

kesehatan, pendidikan 20%, kesehatan 10%, infrastruktur 40%, bisa dipenuhi tetapi Jakarta termasuk daerah yang kuat fiskalnya karena PAD-nya tinggi. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Tetapi kalau daerah-daerah yang lain dan sebagian besar, termasuk daerah pemekaran itu kapasitas fiskalnya lemah ditandai dengan transfer pusatnya jauh lebih besar daripada PAD. Ada daerah yang cuma hanya 5% PADnya dari APBD, ada yang 10%, ada yang cuma 2% seperti daerah-daerah Indonesia bagian timur, daerah-daerah yang ada di pulau-pulau di Kepri, ada Nambas, Natuna kecil.

Nah, ini kalau kita lihat lagi bedah, saya kemarin di, dua minggu yang lalu di membedah di Kepri, hanya Batam saja yang 52% PAD 48% transfer pusat, yang lainnya 5% hanya PAD, 10% PAD. Dan kalau kita belah lagi belanjanya buat apa saja, belanjanya kan ada tiga, belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal. Belanja modal itu adalah infrastruktur 80%, 75, 80% itu adalah untuk belanja pegawai, ini *problem* bagi kita, karena apa? Karena, artinya kalau kebanyakan, kebanyakan pegawai dan yang lebih, lebih ironis kadang-kadang yang banyak tenaga honorernya, tenaga honorernya ada tiga macam lagi, yang *skill* itu adalah Nakes dan Guru, *fine* mereka mungkin diangkat menjadi tenaga P3K, kontrak kerja, diangkat menjadi ASN kontrak kerja. Tetapi yang tenaga administrasi dengan segala hormat, temuan kita, itu rata-rata banyak mereka adalah tim sukses, titipan pejabat, keluarga pejabat, di sana mereka kerjanya ya sebentar jam 8 masuk, jam 10, 11 sudah *enggak* ada kerjaan. Karena *enggak* ada *skill* dan kemudian begitu ganti kepala daerah, yang itu tetap ada, yang kepala daerah baru bawa lagi tim suksesnya, akibatnya meledak di belanja pegawai.

Ada dia, saya *enggak* mau sebutkan daerah di Kepri kemarin kami seharian membahas di Kepri dan saya juga pindah ke daerah-daerah lain, itu bayangkan kalau sudah 80-85% belanja pegawai, maka belanja untuk modal, untuk infrastruktur kemudian untuk pendidikan, kesehatan. Pendidikan kesehatan mungkin diprioritaskan. Infrastruktur tidak, tidak dianggarkan. Sehingga ini ada perlu upaya yang sangat mendasar untuk mengurangi belanja pegawai.

Ini kami merasakan pada waktu kami menjadi Kapolri baru masuk juga 65% adalah belanja pegawai, 20% belanja operasional, 50% belanja modal. *Nah*, kalau dengan postur anggaran seperti itu maka otomatis akan kekurangan biaya operasional, kita tidak akan bisa membangun maksimal hanya dengan 15% dari anggaran yang ada.

Yang kami lakukan waktu di Kapolri adalah ya membuat apa, minimum rekrutmen, jadi kami sebut dengan apa, minimum *zero* rekrutmen. Jadi, hanya merekrut untuk mereka yang pensiun saja, tidak menambah yang baru, atau pemekaran, daerah pemekaran itu boleh tambah tetapi jangan tambah terus menerus.

Nah, ini juga sama dengan konteks yang IPDN ini. Kalau kita nambah terus, tadi Pak Junimart mengatakan ini terendah, betul kami data yang pernah tertinggi 2.000, tetapi apakah dengan merekrut sebanyak-banyak seperti itu, akan tidak menimbulkan masalah, betul *enggak* sesuai dengan kebutuhan daerah itu.

Kita melihat pada waktu pandemi Covid kemarin ada *working from home* pernah sampai 25% ketika Delta, pekerjaan berjalan juga, di Kemendagri berjalan juga, di daerah juga berjalan juga dengan 25% yang *working tim office*. Kemudian yang 75% *working from home*, saya berpikir bukan *enggak* semuanya *working from home* tetapi *rest at home* tinggal di rumah istirahat tetapi dapat gaji.

Nah ini mungkin jadi pelajaran penting waktu kita Covid bahwa betul *enggak* jumlah ASN kita segitu itu betul-betul memadai atau *enggak* kelebihan. Karena apa, resikonya belanja pegawai akan tersedot di situ dan itu terjadi, tolong betul kalau ke Dapil minta data, jelaskan mengenai APBD, berapa jumlah transfer pusatnya, berapa PAD-nya ke mana saja?

Sebagian besar pasti belanja pegawai, kecuali daerah yang PAD-nya tinggi, belanja pegawai dan otomatis dia *enggak* bisa bangun, untuk jalan yang rusak *enggak* bisa. Apalagi kalau terjadi konflik dengan antara daerah tingkat II dengan gubernur dia akan *running* sama-sama menjadi apa namanya itu 2024 menjadi gubernur misalnya. Maka jalan provinsinya *enggak* dibangun, supaya apa? Supaya nanti ya elektibilitasnya akan turun lawan-lawannya. *Nah*, ini bisa terjadi seperti itu.

Oleh karena itu kembali mengenai masalah IPDN 534 ini ya salah satu untuk menekan jumlah rekrutmen pegawai. *Nah*, yang mana, dari mana mengambil rekrutmen sarjananya? Kita sudah sampaikan, tidak mengambil dari sarjana umum tetapi mengambil dari sarjana-sarjana sekolah kedinasan. Jadi, sarjana sekolah kedinasan perhubungan, perikanan, kemudian kehutanan. Ada beberapa sekolah kedinasan yang lain itu yang kemudian kita rekrut ke dalam IPDN, selesai mereka menjadi sarjana di situ rekrut enam bulan atau setahun, tergantung IPDN kira-kira untuk memenuhi standar dasar ilmu pemerintahan, membekali ilmu pemerintahan mereka berapa lama.

Nah, ini yang saya minta kepada Pak Rektor untuk melakukan rapat teknis, untuk menggunakan anggaran yang tadi, tersisa dari alokasi di 1.230 2023 menjadi 534. Kelebihan anggaran, anggaran ini dimanfaatkan untuk membentuk tadi merekrut dari sekolah kedinasan lain dan kemudian diberikan ilmu pemerintahan. Kalau dia misalnya enam bulan, berarti kita bisa dua kali giling, dua kali giling apa, tanpa merekrut ASN baru. Karena sekolah kedinasan ini mereka sudah jadi ASN ikatan dinas. Itulah yang kira-kira perlu rapat teknis dengan Kemendagri, KemenPAN RB, BKN, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemendikbud, ini yang kami kerjakan dan ini yang saya minta Pak Adi untuk membuat segera rapat itu dan hasilnya.

Dan nanti pada saat tertentu kami akan melapor kepada yang kami hormati Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II, karena perubahan anggaran

otomatis kami harus mendapatkan persetujuan dari Komisi II tetapi ide dasarnya ya seperti itulah kira-kira.

Kemudian yang kedua Pak Difriadi mengenai kajian dasar otonomi daerah jadi menjawab juga tadi terakhir Pak Yanuar. Ini kajian dasar otonomi daerah ini memang kami sudah anggarkan, sebanyak, tahun ini sebanyak 8,3 miliar. Sudah dibentuk timnya, saya sudah keluarkan untuk SK-nya tim, tim untuk penyusunan kajian dasar otonomi daerah, ini melibatkan dari akademisi dan juga melibatkan dari pemerhati ormas, pemerhati LSM, pemerhati otonomi daerah, juga pakar-pakar.

Sudah berapa kali rapat? Sudah dua kali rapat ini dan nanti untuk membuat kajian akademik mengenai otonomi daerah yang nanti setelah selesai kami akan paparkan pada saat satu rapat kerja hasilnya kira-kira. Dan tentu itu masih bersifat dasar, kasar, nanti akan sangat terbuka sekali kesempatan untuk apa, untuk berdiskusi atau bila perlu kita melakukan Konsinyering.

Kemudian, mengenai masalah proses pagu indikatif. Pada dasarnya di tingkat pemerintah ada dua jalur. Jalur pertama adalah dari Bappenas Kementerian Keuangan yang menetapkan pagu batas tertinggi indikatif, batas tertinggi kira-kira dari suatu K/L. Dan itu umumnya dilihat dari nomor satu adalah realisasi belanja. Jadi, kalau realisasi belanjanya 80% ya tahun depan akan diberikan kemungkinan besar segitu, karena 20% berarti *enggak* digunakan, *enggak* efektif menggunakan, *enggak* efisien menggunakan. Dan yang K/L lain lebih mungkin yang realisasi belanjanya tinggi, mereka lebih *me-real*-kan.

Makanya seperti Kemendagri tadi disampaikan realisasi belanja kita di tahun lalu adalah 99,11% di atas rata-rata nasional Kemendagri. Kemudian realisasi tahun ini sudah mencapai 39,45% sampai bulan Mei. BNPP pada angka 97,9% ya otomatis kalau mau kasih kita minimal 99,11%. Kalau mau kasih BNPP minimal 97,9% dari pagu yang ada, *enggak* boleh di bawah itu, karena kami memerlukan itu.

Nah, di samping itu mekanisme yang kedua adalah *bottom up*. Artinya dari K/L dapat mengajukan kepada Bappenas, Kementerian Keuangan sesuai dengan visi, misi baru, dinamika baru, tantangan baru adanya program-program yang baru. Jadi, yang lama menjadi patokkan, pagu yang lama menjadi patokkan serta realisasinya, ditambah dengan kita pengajuan yang baru. Dan umumnya kalau seandainya kita Kementerian Keuangan, Bappenas melihat kalau realisasi belanjanya tinggi, umumnya mereka juga akan *approve* kalau ada tambahan-tambahan. Karena dianggap mampu untuk mengelola anggaran dengan baik. *Nah*, ini mekanismenya saya kira itu, *nah* oleh karena itu selesai dari pagu indikatif disampaikan oleh Menteri Keuangan dan Bappenas kemudian kita melakukan *trilateral meeting* untuk berembuk kami memerlukan tambahan untuk program-program ini. Dan ini juga yang kami sampaikan kepada Bapak-bapak, Ibu di DPR sehingga Bapak/Ibu juga bisa mengurangi, bisa menambah, mempertanyakan untuk apa dan lain-lain.

Kemudian tadi berkaitan dengan masalah Pak Guspari Gaus, kami sampaikan mengenai masalah realisasi Bapak. Terima kasih apresiasi Pak Gaus atas memang realisasi anggaran. Realisasi anggaran memang kami menjadi penting bagi kami Pak. Pertama nomor satu adalah tadi kami melihat bahwa pemerintahan dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bappenas selalu melihat realisasinya berapa, kalau realisasinya rendah 60%, 70% ya tahun depan akan dikasihnya segitu 30% pasti akan *wasting* lagi, lebih baik dialihkan ke K/L lain yang realisasi belanjanya tinggi dan dia programnya bagus, kinerjanya bagus begitu. Sehingga kami mengejar realisasinya tinggi tetapi bukan hanya realisasi juga isinya, substansi, kinerja, maka kalau realisasi diukur dengan angka, realisasi oleh Kementerian Keuangan, di *omstand* bisa dibuka *online*. Tapi kalau kinerja diukur selain oleh Kementerian Keuangan, KemenPAN RB, kemudian BPKP dan lain-lain dan *Alhamdulillah* untuk Kemendagri kinerjanya BB *plus* sangat baik, sangat bagus. *Nah*, ini menjadi modal bagi kami untuk mengajukan anggaran tahun depan berikutnya, bahwa kami adalah mampu mengelola.

Nah, yang kedua realisasi belanja ini di tahun, bulan Mei, itu Kementerian Dalam Negeri sudah mencapai hampir 40%, 39,45. Kemudian di BNPP 35,85 ini di atas rata-rata nasional 30%, ini penting, karena arahan dari Bapak Presiden belanja pemerintah pasca Covid ini kita adalah belanja utama, belanja utama untuk membuat terjadinya peredaran uang di masyarakat. Uang yang beredar di masyarakat semakin banyak, itu makin memperkuat daya beli masyarakat dan akan meningkatkan daya beli konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu adalah faktor yang terpenting untuk membentuk angka pertumbuhan ekonomi *growth* maka pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 5,3% itu luar biasa. Jerman saja 0,1%, itu angka yang tinggi ini bisa tercapai, diantaranya karena belanja pemerintah.

Oleh karena itulah Bapak Presiden memerintahkan kepada seluruh K/L jangan mengikuti pola lama, di daerah juga demikian, kami mohon bantuan juga Bapak/Ibu Komisi II ketika ke Dapil juga mendorong di daerah-daerah.

Kebiasaan selama ini baik K/L maupun daerah itu rata-rata nanti digenjotnya diakhir tahun habisnya, jadi sampai dengan bulan September mungkin baru 50%, kemudian begitu di akhir tahun meledak baru 90-an %.

Nah, Pak Presiden menghendaki agar terjadi peredaran belanja pemerintah itu dilakukan konstan, di setiap dua, tiga bulan sekali diberikan target, jangan sampai kecil 5% sampai hari ini banyak sekali daerah yang masih hanya 5%, ada yang cuma 10%. Kemarin saya ke Kepri ada yang baru 15%, padahal waktu sudah tinggal tujuh bulan lagi dan mereka akan meledaknya baru akhir tahun, baru dibelanjakan, baru nanti dibikin program ramai-ramai rapat sana, rapat sini hanya untuk menghabiskan anggaran. Kalau yang menghabiskan program anggaran untuk kontrak akhir tahun *fine* lah. Karena memang undang-undang mengatakan dibayarnya setelah selesai pekerjaan, kalau *enggak* melanggar hukum. Tetapi banyak tadi mengenjot, ditahan baru digenjot akhir tahun, uang *enggak* beredar, akhirnya menumpuk di Bank.

Nah, oleh karena itu kami memberikan contoh sebetulnya kepada teman-teman di daerah karena mengingatkan daerah, kita juga harus kasih contoh bahwa Kemendagri sudah mencapai hampir 40% di Bulan Mei, 26 Mei, daerah juga harus begitu, supaya uang beredar banyak. Kita tahu di daerah itu sesuai dengan target, itu 1.200 triliun, 1.200 triliun di daerah akumulasi semuanya. Kalau bisa 40% saja dari 1.200 triliun, uang beredar di masyarakat tinggi, sehingga ekonomi akan berjalan, swasta juga akan terstimulasi.

Kemudian juga yang berikut dari Pak Hasibuan Pak, anggaran perbatasan kecil sekali. Ya memang kami pahami Pak bahwa ini, lembaga ini, badan ini adalah badan koordinasi sebetulnya, badan koordinatif. Dia hanya operasional di PLBN, eksekutor yaitu mengendalikan langsung pos lintas batas nasional yang jumlahnya delapan dan nanti mau bertambah lagi lima. Operasional memang di bawah badan ini. Tetapi yang lain, terutama untuk pembangunan daerah perbatasan itu lebih kepada koordinasi.

Nah, kami melihat ada persoalan menjadi lembaga koordinasi ini *enggak* gampang, karena kalau ada memerlukan satu pemahaman visi dengan apa kementerian lembaga dan daerah untuk membangun daerah perbatasan yang jumlahnya hampir 500 sekian kecamatan.

Oleh karena itulah kita ingin membangun 222 lokasi prioritas, tetapi ini pun sulit kami lihat. Berapa kali sudah kita lakukan, *enggak* banyak apa kementerian lembaga yang mengerjakan fokus mengenai itu.

Oleh karena itu saya minta BNPP, ini sebagai informasi Bapak-bapak sekalian. Jadi anggaran untuk perbatasan itu dari usulan kita itu dianggarkan untuk membangun daerah perbatasan, total itulah tahun ini 7,7 triliun tetapi uangnya tersebar di berbagai K/L. *Nah*, yang kita takut jadi bukan membuat perbatasan sehingga kami sudah sampaikan, kita akan melakukan rapat, kemarin kita rapat dengan Pak Menkopolkham rapat di Ancol dengan semua K/L dan daerah perbatasan 7,7 triliun itu kita sudah identifikasi di mana saja uangnya. Dan kemudian dibuat program apa dan itu harusnya didikte oleh yang mendikte membangun apa di daerah mana, itu harusnya adalah BNPP. Tinggal eksekusinya dilakukan oleh kementerian lembaga.

Namun kalau seandainya diberikan kesempatan, kami sangat memohon kalau seandainya anggaran yang 231 miliar ini memang kecil, lebih banyak untuk operasional termasuk perbatasan. Kalau bisa mungkin dari 222 lokasi prioritas yang mau dibangun kita mungkin buat model saja. Misalnya 10 kecamatan yang super, lokasi super prioritas karena *urgency*-nya seperti Nunukan misalnya, Sebatik yang berbatasan dengan Malaysia, yang rawan, yang rentan atau daerah lain, sepuluh saja yang itu kita kerjakan oleh BNPP. Sehingga kita bisa menjadi, membuat model yang baik, karena kalau seandainya membuat lintas instansi koordinasi seringkali *enggak* gampang, di tingkat menteri oke, di tingkat pelaksana teknisnya *enggak* jalan begitu.

Nah, kemudian yang terakhir tadi mengenai masalah Pak Yanuar pelatihan Pemdes memang kami akan tambah Pak, kita dapat pinjaman luar negeri, ini dari *World Bank insyaallah* pertengahan ini tahu ini akan cair

anggarannya. Kami pernah laporkan juga pada rapat terdahulu kami sudah koordinasi terus dengan *World Bank* bukan hanya 1.000 mungkin Pak, nanti bisa kita latih dalam waktu yang tertentu, ini mungkin bisa lebih 20.000, 30.000 Pak secara serempak dengan materi mengenai pemerintahan. Terutama masalah perencanaan pembuatan APBDes kemudian masalah *leadership* APBDes, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Itu yang paling penting sekali karena hampir setiap minggu saya tandatangani izin dari kepolisian untuk melakukan pemeriksaan kepada kepala desa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa, itu tiap minggu.

Kemudian yang terakhir tadi dana Parpol yang 156 miliar ini, ya memang dari kemarin kita inginnya dinaikkan dari Rp1.000,00 per suara menjadi Rp3.000,00 per suara. Namun yang keluar masih tetap Rp1.000,00. Jadi ini mumpung ada apa, pembahasan, kalau bisa saran kami, ini sama-sama kita suarakan untuk bisa dinaikkan minimal Rp3.000,00 per-suara untuk parpol Pak sehingga bisa membantu Parpol untuk pendidikan demokrasi.

Demikian.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Menteri.

Walaupun saya kurang puas mohon maaf Pak Menteri ya tentang IPDN, karena setahu saya itu berdiri 1920 Pak, jadi kita harus tetap jas merah mestinya ya. Ada tujuh sekolah kedinasan kenapa itu tidak dikurangi kuota juga, iyakan seperti Kementerian Keuangan bahkan itu nambah Pak jadi 1.200. Kementerian Perhubungan, belum Kemenkumham, belum STKS kalau masih ada kalau saya tidak salah, masih banyak Pak sebenarnya, BSSN, BIN segala macam tetapi kenapa harus IPDN, begitu loh Pak.

Saya bicara IPDN ini karena kami inikan ke Dapil Pak, kita bisa lihat mana yang betul-betul yang paham pemerintahan Pak, bupati sekarang banyak bupati pengusaha, tidak paham pemerintahan, mereka berguru kepada para camat Pak, camat-camat itu dari IPDN. *Nah* itu Pak, ini yang kita sesalkan mestinya, kenapa sampai harus dikurangi quotanya. Kalau pun dikurangi kan ada moratorium, ada moratorium, jangan sekarang lah, kan bisa setahun, dua tahun kemudian kalau kita mau. Jadi ada penyesuaian Pak Menteri tetapi ya nanti saya akan debat kembali dengan MenPAN mengenai ini Pak, mohon maaf, mohon maaf Pak tetap kita akan debat.

Silakan dari kalau masih ada KPU, kalau cukup ya sudah, masih ada menjawab.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Yang tadi saja Pak mengenai uang yang empat koma sekian T itu Pak.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Ada tiga Pimpinan, yang anggota juga perlu kami jelaskan.

Yang pertama begini, untuk tahun anggaran 2022 DIPA KPU itu hanya 2,4T. Lalu kemudian mendapatkan tambahan 1,078T jadi pada akhirnya mendapatkan 3,5T kronologinya demikian. Sehingga kalau kemudian yang sudah disetujui oleh Banggar delapan koma sekian T. Kemudian yang di apa namanya dalam pagu, dalam apa namanya pagu alokasi dan kemudian tambahannya total menjadi 3,5, ini dasarnya karena ada surat dari Menteri Keuangan. Bahwa kemudian apa indikatornya, tentu pembicaraan-pembicaraan awal sudah ada Pak tetapi kemudian begitu disurati jumlahnya KPU dapat sekian, ya kami mau menanyakan yang 4,5 juga *enggak* mungkin Pak. Jadi, munculnya angka sekian kemudian dapat tambahan sekian memang berdasarkan dari surat dari Menteri Keuangan.

Yang berikutnya untuk anggaran tahun 2024 soal anggaran teknologi informasi di mana dianggarkan sementara ini 370M, apakah sudah cukup untuk menjangkau? Nanti kami kaji kembali Pak, apa namanya detail dan kebutuhannya untuk 2024.

Yang berikutnya soal uang penghargaan Pak untuk Anggota KPU provinsi, pusat, KPU provinsi kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan juga diatur di Undang-Undang nomor 11 2015 tentang Penyelenggara Pemilu.

Kemudian setelah ada Undang-Undang No. 7 2017 ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggara Pemilu dijadikan satu di dalam Undang-Undang No.7 2017. *Nah*, di undang-undang itu tidak dikenal lagi istilah uang penghargaan.

Nah, yang kemudian teman-teman me-apa namanya, katakanlah menuntut atau itu menjadi hak dari teman-teman itulah KPU penyelenggara pemilu 2014. Yang kemudian oleh KPU periode 2017-2022 sudah di apa namanya, sudah diusahakan dengan berkirim surat mengajukan permohonan ke berbagai macam pihak, sampai sekarang belum ada realisasinya. Di antaranya karena ada pertanyaan atau persoalan tentang apa klausul tentang

uang penghargaan sekarang sudah tidak ada lagi di Undang-Undang No. 7 2017.

Kami periode kemarin dan juga periode ini sudah memperbaharui surat tersebut, menyiapkan kembali bahwa teman-teman penyelenggara pemilu di jajaran KPU terutama pemilu 2014, itu ada nomenklatur uang penghargaan tetapi sekarang belum dapat dipenuhi.

Yang berikutnya Pak Guspari Gaus. Seingat saya dalam catatan yang saya ingat Pak, mungkin lebih tetapi yang saya ingat saja. Soal penghargaan yang diterima KPU diantaranya adalah dalam catatan saya ya, ada delapan. Yang pertama untuk JDIH, secara berturut-turut, empat tahun berturut-turut KPU sebagai lembaga non struktural JDIH terbaik.

Yang kedua WTP seingat saya 2021 dan 2022 terakhir, sebelumnya itu kalau *enggak* 2018-2019 untuk WTP.

Kemudian yang ketiga KPU pernah mendapatkan apa namanya penghargaan dari Kementerian Keuangan pada tahun 2022 kemarin akhir tahun. Tata kelola aset barang milik negara, ada tiga kategori. Jadi KPU dapat penghargaan untuk tiga kategori; yang pertama adalah digitalisasi apa namanya aset BMN, kemudian pelaporan aset BMN dan kemudian apa namanya tata kelola untuk lelang non wajib kalau *enggak* salah ya, ada tiga dalam waktu bersamaan KPU mendapatkan tiga. Padahal unit kerja KPU ini mulai KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota ada 548 satker. Jadi ketika mendapatkan tata kelola pelaporan aset barang milik negara ini satu apa, dalam pandangan kami satu penghormatan, penghargaan yang luar biasa dari Kementerian Keuangan kepada KPU.

Yang keempat, KPU mendapatkan penghargaan dari apa namanya Komisi Informasi Publik sebagai lembaga non struktural yang informatif tingkat pertama untuk kategori lembaga non struktural.

Kemudian yang kelima KPU mendapat penghargaan dari PR Indonesia atau Public Relation Indonesia sebagai lembaga terpopuler di media cetak dan media *online* untuk tahun 2022.

Kemudian yang keenam KPU mendapatkan penghargaan atau apa namanya, ya katakanlah penghargaan dari KPK sebagai lembaga non struktural paling berintegritas dengan angka 73,4 di atas rata-rata nasional 71,44.

Kemudian yang ketujuh, terakhir ini dalam publikasi yang dilakukan oleh Kompas, KPU mendapatkan peringkat ketiga, lembaga yang dipercaya oleh publik dan kemudian yang kedelapan KPU mendapatkan penghargaan dari Badan, BKN itu kepegawaian ya? Badan Kepegawaian Negara yaitu implementasi apa namanya? Manajemen kinerja peringkat tiga nasional. Ini sesungguhnya yang kami ingat dan sempat kami catat.

Yang berikutnya pertanyaan Pak Gaus tentang anggaran tahun 2023, anggaran sudah disetujui oleh Banggar adalah 23T tetapi kemudian yang masuk dalam pagu indikatif istilahnya oleh kementerian 2023 itu 15 triliun, masih kurang tujuh dan kami ajukan, terutama untuk honor dan operasional Badan *Ad Hoc*, PPK, PPS dan PPLN.

Jadi, kalau untuk Bulan Juli sampai Desember 2023 artinya apa? Anggaran 15T itu komponen untuk honor dan operasional Badan *Ad Hoc* itu baru sampai bulan Juni 2023.

Kalau Pak Gaus bertanya kepada kami tentang apa yang akan terjadi kalau itu tidak terpenuhi 7T, Pak Gaus bisa menjawab sendiri saya kira, saya tidak akan menjawab Pak. Berarti Badan *Ad Hoc* tidak akan bisa bekerja karena tidak ada honorinya maka konsekuensinya Pak Gaus bisa menjawab sendiri.

Kemudian yang berikutnya untuk tahun 2024 kalau coblosannya 14 Februari 2024 pertanyaan Pak Gaus, kenapa anggaran 2024 lebih banyak daripada 2023? Karena gelar pasukannya banyak Pak. Kalau dihitung untuk mengoperasionalkan sekitar lebih dari 800.000 sekitar 800, ini masih kita finalisasi ya, sekitar 813.000 TPS di dalam dan luar negeri. Kemudian Badan *Ad Hoc* beserta sekretariatnya kurang lebih 8 juta orang, itu anggarannya 18,6 triliun.

Jadi, kalau dibandingkan dengan anggaran total 2024 yang apa, sebenarnya 27 triliun Pak, 29 itu kalau dengan DOB yang *real* untuk pemilu 2024 adalah 27 triliun 18,6 triliun kalau dibagi 27 triliun itu sekitar persentasenya 68,13% anggaran untuk honor badan *Ad Hoc*. Jadi, kenapa anggarannya tinggi, meningkat dibanding 2023, anggaran 2024 memang lebih banyak untuk apa namanya mengoperasionalkan para penyelenggara pemilu Badan *Ad Hoc*.

Kemudian pertanyaan tentang apakah sekiranya terjadi pilpres putaran kedua, sudah ada anggarannya? Seingat saya dalam apa persetujuan Banggar itu sudah ada Pak. Namun demikian, untuk pagu indikatif tahun 2024 sebagaimana presentasi kami yang untuk tahun anggaran 2024 Pak Gaus, pada bagian bawah sudah kami sampaikan pagu indikatif KPU tahun 2024 tidak termasuk anggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua. Jadi ini sudah kami sampaikan di dalam apa itu namanya, di dalam presentasi.

Saya kira demikian, terima kasih Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya, terima kasih Saudara Ketua KPU.

Kita sepakat saja bila pendalaman nanti juga kami akan ada dalam semua ini, karena yang saya terus terang Rp4,5 triliun ini Pak, saya masih bertanya ini, kita sudah ketok, masuk ke Banggar, di Banggar sudah apa

namanya dibahas dengan pemerintah, sudah sepakat dan rakyat sudah tahu 76T 65 sekian untuk anggaran pemilu, tetapi ternyata setelah *ada facto* bukan begitu Pak, nanti kita akan alami ini ya Pak ya. Begitu ya Bawaslu, DKPP, Pak Menteri ya, nanti kita pendalaman saja Pak, ini Pak Bagja sudah WA-WA dari rumah mungkin.

Baik, kita masuk pada kesimpulan biar cepat. Iya Bagja dari rumah sudah WA terus itu, tolong dibuka Pak.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(RAHMAT BAGJA):**

Kami harus jawab Pak Gaus karena ini berkaitan dengan.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A.,
M.H., M.IP.):**

Oh iya silakan.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(RAHMAT BAGJA):**

Izin Pak.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A.,
M.H., M.IP.):**

Karena untuk membuktikan WA dari rumah ini.

Silakan Pak.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
(RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):**

Anggaran yang kurang bagaimana pertanyaan Pak Junimart tadi, kami sampaikan bahwa kami permintaan kepada Kementerian Keuangan dan akhirnya kami ditambah anggaran tambahan sebanyak dua kali, jadi dapat sekitar 900 miliar Pak, yang pertama 700 miliar, yang kedua 200 miliar. Tadi menyambung dengan Pak Gaus kenapa jadi 88%? Karena anggaran itu dikasih pada Bulan Agustus dan September Pak.

Jadi, untuk kemudian merealisasikan untuk belanja maka yang paling banyak itu belanja 300 miliar tidak terpakai karena kami sudah terlambat untuk melakukan tender dan lain-lain. Sehingga kemudian hanya bisa membuat terserap 88,36%. Jadi 400 miliar itu, 300 miliarnya belanja Pak, karena kami harus buat *bidding* dan lain-lain itu tidak mencukupi sampai dengan karena di November itu harus sudah selesai semua biasanya dan itulah yang kami agak bermasalah, pertama.

Kemudian, kami juga operasional misalnya, belanja pegawai kami banyak yang surat izin pindah alih statusnya bermasalah di lembaga awal. Kemudian karena intensitas anggaran pengawasan pemilu tahun 2024 dimulai Juni 2022 maka anggaran lebih banyak turun ke bawah sehingga anggaran uang makan, uang lembur, uang makan lembur tidak terealisasi. Karena kita langsung ke bawah teman-teman Panwascam, teman-teman Bawaslu kabupaten/kota dan staff.

Kemudian juga ini yang telah kami sampaikan berkali-kali bahwa operasional untuk teman-teman pegawai kontrak itu banyak yang tidak terpakai karena kami misalnya formasi di lapangan Bawaslu Kabupaten/Kota misalnya mempunyai formasi 17, 5 orangnya sudah mengundurkan diri pegawai kontraknya Pak pindah ke lembaga lain. Sehingga anggaran tersebut tidak terpakai juga, kami kalau menambah kemudian kalau ingin menambahkan pegawai akan terkena PerPres 64, itu yang membuat anggaran kami bermasalah. Bahkan sampai Bawaslu Provinsi sekarang banyak teman-teman staff Bawaslu di tingkat RI sampai dengan kabupaten/kota mendaftar kepada Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga ini juga menambah kekurangan lagi ke depan teman-teman kami karena ketidakpastian untuk teman-teman kontrak lanjut dalam penyelenggaraan pemilu, karena di November 2023 sesuai dengan PerPres maka tidak ada lagi pegawai kontraktual di Bawaslu dan ini juga akibatnya anggaran tidak terpakai Pak.

Kemudian, masalah honorarium, alokasi anggaran sewa kantor Panwascab juga tidak terpakai, karena baru kemudian Bulan Oktober atau bulan November baru bisa dipakai. Ini kemudian membuat anggaran ini karena terlambat Panwascamnya maka membuat anggaran tidak terpakai Pak.

Kemudian ada pertanyaan dari mengenai putaran kedua paling banyak 4,6 itu paling banyak itu untuk anggaran *Ad Hoc* Pak, pengawas TPS pengawas kelurahan desa, pengawas kecamatan dan juga pengawas luar negeri. Berikut operasional di Panwascam dan lain-lain dan pengawas luar negeri, itu sekitar dua koma triliun lebih itu dia alokasikan untuk itu, yang lainnya untuk penambahan di Bawaslu kabupaten/kota dan staff.

Kemudian, kenapa anggaran sosialisasi ditebalkan? Iya ini juga menjawab pertanyaan teman-teman, Bapak/Ibu di Komisi II. Sehingga kami harus menyampaikan bahwa agar ada 400 titik yang akan bisa digunakan. *Nah*, bagaimana kemudian pembagiannya *monggo* di Komisi II untuk dirembukkan Pak.

Dan kemudian kami juga mendapatkan WA dari Ibu Rezka tadi juga menjawab yang mengingatkan dari Ketua Komisi II mengenai seleksi Pak. Kami sudah melakukan surat edaran bahwa Timsel Bawaslu kabupaten/kota, Timsel Provinsi tidak boleh menerima apapun dan juga mencari apapun yang berkaitan dengan seleksi Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota. Dan surat edaran ini sudah kami sampaikan kepada teman-teman Timsel.

Sehingga kemudian ada Timsel yang mohon maaf Pak, teman-teman Kabupaten/Kota ingin kemudian mendekati Timsel, dengan apa, dengan

mengundang Timsel tersebut menjadi pembicara, kami tidak perbolehkan. Karena kalau terjadi demikian maka akan hubungan antara Bawaslu kabupaten/kota yang akan kemudian bertarung kembali, berkompetisi kembali dengan Timselnya, karena sering diundang. Ini yang kemudian jadi Timsel juga protes, kenapa kami tidak diundang lagi? Kami sampaikan bahwa karena ini menyangkut konflik kepentingan maka tidak diperbolehkan.

Berkaitan juga Ibu Rezka tentang Bawaslu Timsel Panwaslu Provinsi Lampung kami juga akan tindaklanjuti Bu, untuk di kami sampaikan kepada, untuk kami periksa.

Demikian Pak, sehingga kami harapkan seleksi Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota tidak ada berbau masalah transaksional dan lain-lain, kami harapkan tidak terjadi demikian.

Terima kasih Pak Wakil Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Sekali lagi saya mengingatkan Pak, itukan Timsel. Timsel itu terus ada proses setelah diumumkan dia lolos. Terus ada pra tanggapan, pra tanggapan, lolos tetapi dipindah Dapil dia Pak, itu bagaimana ceritanya?

Misalnya dia dikoridor a, lolos Pak, lulus dan lolos, itu istilah saya. Ada orang lulus *enggak* lolos Pak, iya ada orang lolos walaupun *enggak* lulus, iya Pak ya.

Nah, kalau di Timsel ini Pak Menteri, ini fakta ini Pak. Dia sudah lulus dan lolos di apa namanya zona a, tetapi setelah kelengkapan dia berpindah ke zona b atau ke zona c. Mestinya kan kalau ada tanggapan, pra tanggapan dia sudah tidak duduk di situ lagi dong, itu apa pertimbangannya kira-kira Pak?

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., L.L., M.):

Setahu saya Pak, jika ada tanggapan masyarakat berkaitan dengan integritas, kami biasanya akan coret yang bersangkutan Pak.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ini *enggak* dicoret Pak, saya punya data itu.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., L.L., M.):

Kami.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Bagaimana Pak, apakah ada *by request* atau apa Pak?

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., L.L., M.):

Iya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ada *request* enggak itu?

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., L.L., M.):

Enggak-enggak, insyaallah enggak ada Pak.

Kami juga mengingatkan kepada staff sekretariat dan juga kami sendiri agar tidak kemudian melakukan hubungan yang tidak professional kepada calon-calon Anggota Bawaslu Pak.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya, bagaimana caranya Bawaslu Pusat maupun KPU Pusat itu bisa melakukan pengawasan kepada Timsel di provinsi Pak?

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., L.L., M.):

Dibuat layanan pengaduan Pak kepada masyarakat, sehingga bisa dilakukan ada emailnya yang bias kemudian bisa di sampaikan kepada kami terhadap segala bentuk perilaku yang kemudian tidak professional dalam seleksi Pak.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Oh iya baik, ini pertanyaan Ibu Rezka sebenarnya ini yang saya lanjutkan.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., L.L., M.):

Iya siap terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Dia *enggak* berani bicara Pak.

Silakan DKPP.

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HEIDDY LUGITO):

Terima kasih Pimpinan.

Izin saya menjawab pertanyaan Pak Anggota Dewan, tadi ditanyakan kenapa itu realisasi untuk anggaran kerjasama sudah habis 94%, kemudian untuk perkara hukum lembaga baru terserap 6% Pak.

Ceritanya begini Pak, anggaran awal DKPP itu pagu anggaran 2023 itu cuma 26 miliar. Awal bulan ini, bulan lalu, bulan Mei, kita dapat tambahan anggaran 66 miliar. Jadi dan tambahan anggaran itu semuanya untuk persidangan Bapak, untuk perkara hukum. Jadi makanya terserapnya masih sedikit karena baru Bulan Mei kemarin.

Nah, kalau kita hitung semuanya sebenarnya, kalau dengan pagu yang 26 miliar tadi anggaran DKPP sudah terserap 55%, karena ada tambahan anggaran itu dan *insyaallah* tambahan anggaran itu mohon doa restu Bapak bisa terserap semuanya. Salah satu diantaranya tadi kami usulkan inikan anggaran khusus untuk persidangan Pak, jadi 66 miliar itu hanya bisa dipakai untuk anggaran persidangan.

Mencermati jumlah pengaduan yang masuk saat ini, ini kemungkinan akan terserap sampai di atas 90%. Jadi, kira-kira begitu dan kami punya usulan juga untuk 2024 nanti adalah honor untuk tim pemeriksa daerah, *enggak* besar Pak, karena jumlahnya cuma satu komisi dua orang itukan, honor tim pemeriksa daerah. Karena sifatnya *Ad Hoc* paling ya satu bulan, satu anggota TPD itulah barang dua juta, dua juta kali satu komisi dua orang, cuma empat juta satu provinsi, kali 38, tidak besar Pak. Jadi, kira-kira seperti itu, itu rencana kami untuk 2024.

Kalau masih ada sisa anggaran persidangan yang dialokasikan yang pagu 2023 mungkin akan kami geser untuk ke sana Pak. Jadi bukan untuk kerjasama, lebih baik akan kami gunakan untuk operasional biaya persidangan. Begitu Pak saya kira, cukup Pimpinan dari saya.

Terima kasih Pak Gaus.

Penghargaan DKPP terlalu banyak, jadi *enggak* saya sebutkan satu per satu, iya mohon maaf Pak. Nanti saya japri Pak, penghargaan ini-ini-ini berapa banyak ya Pak Gaus, mohon izin.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Cukup puas Pak Gaus?

Baik, kita masuk ke kesimpulan ya, silakan ditayangkan.

Untuk kesimpulan nomor satu, Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

A. Kemendagri dan DKPP

1. realisasi APBN Tahun 2022 sebesar Rp3.200.796.124.766,00 dari pagu alokasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp3.229.423.335.000,00 atau sebesar 99,11%. Realisasi anggaran tersebut sudah termasuk realisasi anggaran DKPP sebesar Rp26.962.358.466,00 dari pagu alokasi anggaran DKPP Tahun 2022 sebesar Rp27.101.703.000,00 atau sebesar 99,49%.
2. realisasi APBN Tahun 2023 per 26 Mei 2023 sebesar Rp1.239.851.674.367,00 dari pagu alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp3.142.715.418.000,00 atau sebesar 39,45%. Realisasi anggaran tersebut sudah termasuk realisasi anggaran DKPP sebesar Rp15.856.102.748.000,00 dari pagu alokasi anggaran DKPP Tahun 2023 sebesar Rp92.353.233.000,00 atau sebesar 17,17%.
3. pagu indikatif RAPBN 2024 sebesar Rp3.209.764.560.000,00 sudah termasuk pagu indikatif DKPP tahun 2024 sebesar Rp67.381.500.000,00.

Cocok ya Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

B. BNPP

- Realisasi APBN Tahun 2022 sebesar Rp231.912.709.344,00 dari pagu alokasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp236.895.124.000,00 atau sebesar 97,90%.
- Realisasi APBN Tahun 2023 per 26 Mei 2023 sebesar Rp89.102.726.566,00 dari pagu alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp248.508.954.000,00 atau sebesar 35,85%.
- Pagu indikatif RAPBN Tahun 2024 sebesar Rp231.300.651.000,00. Selanjutnya usulan pergeseran anggaran tahun 2024 sebesar Rp22.303.366.000,00.

Setuju ya Pak cocok ya?

(RAPAT: SETUJU)

C. KPU RI

- Realisasi APBN Tahun 2022 sebesar Rp3.378.768.257.503,00 dari pagu alokasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp3.516.283.014.000,00 atau sebesar 96,9%.
- Titik yang kedua realisasi APBN Tahun 2023 per Mei 2023 sebesar Rp6.531.359.228,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp15.987.872.001.000,00 atau sebesar 40,83%.
- Pagu indikatif RAPBN tahun 2024 sebesar Rp28.365.496.586.000,00, usulan tambahan anggaran untuk kekurangan kebutuhan anggaran tahun 2023 sebesar Rp7.869.445.225.200,00 dan usulan tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp17.346.771.463.000,00

Cocok ya Pak Hasyim?

(RAPAT: SETUJU)

D. Bawaslu Republik Indonesia

- Realisasi APBN tahun 2022 sebesar Rp2.598.643.002.539,00 dari pagu alokasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp2.940.924.979.000,00 atau sebesar 88,36%.
- Realisasi APBN tahun 2023 per 23 Mei 2023 sebesar Rp2.768.607.033.247,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp7.103.821.817.000,00 atau sebesar 38,97%.
- Pagu indikatif RAPBN tahun 2024 sebesar Rp11.605.527.974.000,00. Usulan tambahan anggaran untuk kekurangan kebutuhan anggaran tahun 2023 sebesar Rp6.201.048.550.096.000,00 dan usulan tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp1.618.643.553.000,00.

Dua, terhadap pagu indikatif RAPBN tahun 2024 yang diusulkan oleh Kemendagri, BNPP, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diusulkan oleh KPU RI dan Bawaslu RI serta usulan pergeseran anggaran BNPP maka Komisi II DPR RI akan memahasnya secara mendalam pada Rapat Dengar Pendapat yang akan datang.

Tiga, yang terakhir Komisi II DPR RI minta kepada Kemendagri, BNPP, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran Tahun 2023 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan satuan dan kegiatan atau satuan tiga beserta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI, paling lambat pada hari Jum'at tanggal 2 Juni Tahun 2023 sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2024 yang akan datang.

Demikian, cocok ya?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya silakan Pak.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Usul teknis penulisan saja karena ini lembarnya banyak, mungkin setiap lembar diberikan nomor halaman.

Kemudian yang kedua.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Setiap apa tadi?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Inikan lembarnya lebih satu halaman, sampai berapa itu, enam lembar, saya usul setiap lembar diberikan nomor halaman untuk memudahkan kita membaca.

Kemudian yang kedua mohon operator naik ke atas yang, *nah* untuk yang pointers titik-titik lebih baik saya usul digunakan angka saja, misalkan C kemudian iya, ini yang titik-titik itu supaya memudahkan bacanya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Cocok karena ini KPU suka angka-angka ini.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Sesuai arahan Pimpinan. Ini mohon nanti begini, kemudian yang berikutnya untuk penulisan angka uang itu sepanjang yang saya ketahui menurut tata bahasa yang benar dan juga menurut apa namanya, *legal drafting* itu koma dibelakangnya bukan strip tapi nol-nol yang benar.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Kemudian untuk presentase nanti sekalian dirubah untuk presentase misalkan itu seperti 99.49%, itu kalau menggunakan kaidah Bahasa Indonesia 99,49 bukan titik.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Bukan titik ya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Kalau *in english* pakai titik.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Saya baca yang ditulis saja Pak.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Titik ya titik, koma ya koma Pak, kalau hukum tanya saya Pak dengan Pak Tito lebih paham Pak.

Itu tetap B ya? Atau A besar B besar, ya Mbak. Iya.

Cocok Pak Hasyim ya, Pak Hasyim cocok ya?

Itu pakai nomornya bagaimana itu? Sudah betul ya atau nomor kecil saja? Sudah betul ini Pak Bagja?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Izin Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya silakan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Nomor halaman ya karena enam lembar, kalau *enggak* dikasih nomor halaman nanti buka-bukanya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ini tiga lembar Pak bukan enam Pak.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Itu di situ *page*-nya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Enggak ah tiga lembar ini, ini depan saya ini.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Soalnya di situ ditulis enam lembar.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Di dieu mah tilu kang. Jadi tiap halaman kita paraf saja, *enggak* apa-apa, biar kaya notaris itu loh.

Ayo silakan-silakan Pak.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. DR. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, B.S., M.S., PH.D.):

Iya satu *point* saja Pimpinan sekalian. Jadi yang bagian terakhir sekali.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Bagian terakhir, Mbak.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. DR. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, B.S., M.S., PH.D.):

Iya, tadi mengenai itu yang nomor tiga, Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri dan seterusnya untuk segera menyampaikan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Pagu.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. DRS. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, B.S., M.S., PH.D.):

Iya. Sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan satuan tiga, ini seingat kami ada keputusan MK di tahun ini.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Coba-coba atas Mbak, satuan tiga ya.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. DRS. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, B.S., M.S., PH.D.):

Iya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Besarkan, besarkan.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. DRS. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, B.S., M.S., PH.D.):

Seingat kami di tahun 2014 itu ada keputusan MK yang sudah menghapuskan kewenangan kepada DPR untuk meminta apa, data informasi sampai dengan satuan tiga kepada pemerintah.

Yang ada adalah ketika setelah, yang disampaikan adalah pada tahapan program. *Nah*, kemudian ketika sudah menjadi APBN paling lambat satu bulan mitra nanti memberikan kepada DPR sebagai bentuk bagian dari pengawasan nantinya kedepan. Ini kalau, saya kurang tahu apakah ada perubahan, sudah ada perubahan lagi keputusan yang lain tetapi kalau seandainya keputusan itu belum diubah maka *point* nomor tiga ini nanti kita akan mendapatkan kritik dari pemerhati dan lain-lain karena melanggar keputusan MK itu.

Bukan berarti dari mitra berkeberatan tetapi nanti kita sama-sama melanggar, kami takut, jadi mohon dipertimbangkan ini. Jadi hanya pada dan rinciannya sesuai dengan program dan target capaian kinerja. Di sini tidak menyebutkan istilah satuan tiga lagi atau kegiatan, kegiatan satuan tiga, itu mungkin bisa dibuka juga di keputusan MK 2014 tentang kewenangan DPR

dalam apa anggaran, itu tidak sampai satuan tiga lagi tetapi hanya sampai kepada program iya.

Untuk pengawasan nanti setelah APBN disahkan. Setelah APBN disahkan maka mitra akan satu bulan paling lama menyampaikan satuan tiga, tetapi dalam bentuk apa namanya itu, untuk pengawasan bukan dalam bentuk penentuan anggaran.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ini gimana ini? Satuan tiga di mana?

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. DR. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, B.S., M.S., PH.D.):

Betul, keputusan MK.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Bagaimana? Pake halo-halo Pak biar kedengaran Pak.

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Satuan tiga itukan urusan pemerintah Pak sudah rinci. Kalau kita kan urusan kebijakan, ya kita gelondongan saja itu.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya. Kalau saya, saya kira satu jadi tiga Pak, satuan tiga ini, iya kan, karena suruh baca begini juga malas kita Pak, itukan pasti rincian ya Pak ya, wah *enggak* lah Pak *enggak* jadi Pak, dihapus saja itu, *enggak* mungkin kita baca itu, kecuali setelah-setelah dibelanjakan boleh kita minta.

Jadi, Pak Menteri gimana, rincian sesuai dengan jenis belanja, ayo dan kegiatan satuan tiga hilang Pak?

Coba Pak pakai halo-halo biar dengar Pak kita. Ayo Pak Menteri.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. DR. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, B.S., M.S., PH.D.):

Iya, jadi cukup dengan dan rinciannya sesuai dengan program.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Sesuai dengan program beserta target.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. DRS. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, B.S., M.S., PH.D.):

Program dan target.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Program beserta target dan capaian kinerja, cocok ya Pak ya?

Sudahlah Pak Hasyim sudah jam berapa ini.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Mohon izin.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Saya perpanjang dulu ya satu jam, oh iya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Tanggal 2 Juni itu seingat saya itu tanggal merah.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Hari Jum'at Pak.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Merah tanggal merah.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Kalau untuk duit *enggak* apa-apa merah Pak, kita *enggak* libur Pak.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Izin Pimpinan.

1 Juni Hari Pancasila, 2 Juni cuti bersama libur waisak, sabtu cuti bersama, minggu cuti lagi, senin libur bersama, *enggak*, senin masuk.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Jadi kapan Pak Hasyim? Kita tanya Pak Hasyim saja.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Senin tanggal 5 Pak.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Pak Hasyim,

Cukup senin bisa, ini Pak Hasyim sibuk Pak, kita atau Pak Akmal kita tanya, gimana Pak Akmal? Senin ya, ya paling lambat hari Senin tanggal 5 Juni, cocok ya Pak Akmal?

AKMAL:

Siap.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Nah, ini Pak Akmal suaranya sudah lama *enggak* kita dengar ini, Pak Akmal makin hitam semenjak jadi Gubernur.

Sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN Tahun 2024 yang akan datang, cocok ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,


Dari meja Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II menyampaikan terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPP, Ketua DKPP, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu beserta jajarannya dan para hadirin semua. Kiranya kesehatan bersama kita selalu.

Terima kasih.

*Wabilahitaufig wal hidayah,
Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 23.24 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**

a.n. 

**Mahmud, S.E.
196508021988031002**